

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
HASIL REVIEW INSPEKTORAT



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan P.Diponegoro No 101 (0295) 691033 Fax (0295) 691033
Kode Pos 59211

Website: <https://dputaru.rembangkab.go.id>

Email: dputarurembang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KAB. REMBANG



MARYOSA, A.TD., M.T
Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan”

- Diukur dengan Indeks Aksesibilitas Jalan dengan rumus perhitungan Indikator $(\text{panjang jalan kondisi mantap}) / (\text{Luas Wilayah Administrasi})$.
Panjang Jalan Kondisi Mantap = Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang. Panjang Jalan Kondisi Baik (277,418 km) + Panjang Jalan Kondisi Sedang 145,481 km dibagi 594,199 km.
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 sebesar 0,50 terealisasi sebesar 0,41. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 81,60% kategori tinggi.
- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2023 sebesar 0,41 sama dengan capaian target di Tahun 2024 yaitu sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 0,02 mengalami kenaikan yang cukup baik.

2. Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Akses Layanan Dasar”

- Diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar dengan rumus perhitungan $(\text{Capaian Air Minum} + \text{Air Limbah Domestik} + \text{drainase} + \text{persampahan}) / 3$.
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 sebesar 76,13 terealisasi sebesar 76,45. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,42% kategori sangat tinggi.
- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2023 mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir dari Tahun 2022 sebesar 52,67 dan Tahun 2023 sebesar 73,44.

3. Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air”
 - Diukur dengan Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku dengan rumus perhitungan $(\text{jumlah ketersediaan air baku})/(\text{kebutuhan air baku}) \times 100\%$.
 - Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 sebesar 55% terealisasi sebesar 40,43%. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 73,51% kategori sedang.
 - Capaian target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Tahun 2021 sebesar 35%, Tahun 2022 sebesar 29,90% dan Tahun 2023 sebesar 30,70%.
4. Capaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah”
 - Diukur dengan Indikator Kinerja Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang dengan rumus perhitungan $(\text{jumlah dokumen RTR yang ditetapkan})/(\text{jumlah dokumen RTR yang direncanakan}) \times 100\%$.
 - Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 sebesar 8 terealisasi sebesar 1. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 12,5% kategori sangat rendah.
 - Capaian Tahun 2024 tercapai 1 dokumen mengalami penurunan dari Tahun 2022 tercapai 3 dokumen, Tahun 2023 tercapai 2 dokumen. Hal ini terjadi karena memerlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat melaksanakan target secara optimal dan sinergi yang baik dengan banyak pihak.
5. Capaian Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi”
 - Diukur dengan rumus perhitungan $(\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun } (n) - \text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksi tahun } (n-1))/(\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun } n-1) \times 100\%$.

- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yaitu Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 sebesar 48,3% terealisasi sebesar 31,95% . Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 66,16% kategori sedang.
 - Tahun 2024 realisasi sebesar 31,95% mengalami penurunan dari Tahun 2022 sebesar 47,30%, dan Tahun 2022 sebesar 47,30%. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.
6. Capaian Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik”
- Diukur dari Nilai SAKIP OPD.
 - Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 sebesar 70,35 terealisasi sebesar 70,56 . Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,29% kategori sangat tinggi.
 - Tahun 2024 sebesar 70,56% mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 69,68%, Tahun 2022 sebesar 70,40 dan Tahun 2023 sebesar 70,56%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien dan tepat guna dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Ketersediaan infrastruktur jalan kondisi mantap untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan Layanan pada wilayah yang masih tertinggal dalam akses layanan dasar.
4. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pelayanan air limbah untuk mendukung perluasan cakupan.

5. Percepatan pembangunan infrastruktur air dengan membangun, merehabilitasi bendungan, waduk dan saluran air guna mendukung ketahanan pangan daerah.
6. Menggalakkan penghijauan dan perlindungan daerah resapan air.
7. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam menjaga dan mengelola sumber daya air.
8. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan tata ruang daerah.
9. Pemenuhan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dibidang bangunan dan jasa konstruksi untuk mendukung kinerja bangunan dan jasa konstruksi.
10. Peningkatan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang SAKIP dan pengelolaan kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Casacading dan struktur Organisasi	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	7
1.4 Isu Isu Strategis.....	10
1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia.....	12
1.6 Sarana dan Prasarana (BMD).....	12
1.7 Anggaran.....	14
1.8 Dasar Hukum.....	22
1.9 Sistematis Laporan Kinerja	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	24
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	26
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	34
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	47
3.2 Skala Capaian Kinerja.....	47
3.3 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024.....	48
3.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022 dan 2023	50
3.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	52
3.6 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika Ada).....	55
3.7 Skala Kinerja Lainnya	48
3.8 Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	62
3.9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
3.10 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	71
3.11 Realisasi Anggaran	83

3.12 Prestasi Yang Dicapai.....	92
BAB IV PENUTUP	97
Lampiran.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2024.....	12
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	13
Tabel 1.4	Anggaran Tahun 2024.....	14
Tabel 1.5	Sumber Dana Anggaran Tahun 2024.....	15
Tabel 1.6	Rekapitulasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal Sakip Tahun 2023.....	16
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	25
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2024.....	27
Tabel 2.4	Struktur, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	28
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2024.....	34
Tabel 2.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2024.....	35
Tabel 2.7	Profil Indikator Kinerja	44
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	48
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	48
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja.....	50
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	53
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.....	55
Tabel 3.6	Jenis Pelayanan Dasar.....	58
Tabel 3.7	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	58
Table 3.8	Anggaran Pencapaian SPM.....	59
Tabel 3.9	Jumlah Personil Pengampu SPM.....	59
Tabel 3.10	Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Air Minum Sehari hari.....	59
Tabel 3.11	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaian.....	60
Tabel 3.12	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.....	60
Tabel 3.13	Indeks Pencapaian Mutu SPALD.....	60
Tabel 3.14	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	61

Tabel 3.15	Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian SPM.....	61
Tabel 3.16	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah Anggaran Pencapaian SPM.....	61
Tabel 3.17	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	62
Tabel 3.18	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	68
Tabel 3.19	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program.....	71
Tabel 3.20	Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	84
Tabel 3.21	Kegiatan Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading DPUTARU.....	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang.....	6
Gambar 2.1	Sceenshot Aplikasi Sapa Kinerja.....	46
Gambar 3.1	Penghargaan Juara 3 Program SISWATEK Tingkat Jawa Tengah	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

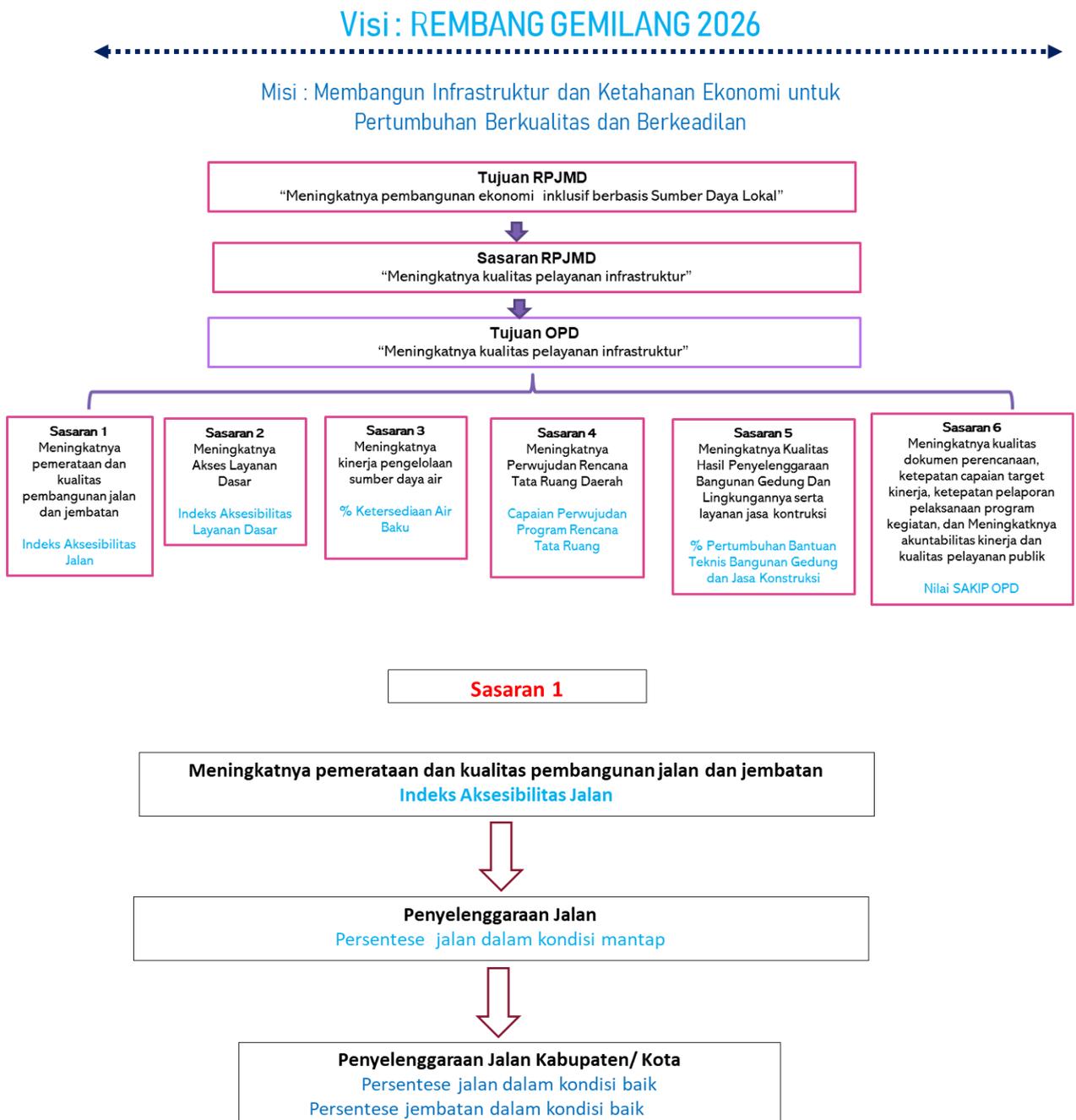
Penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

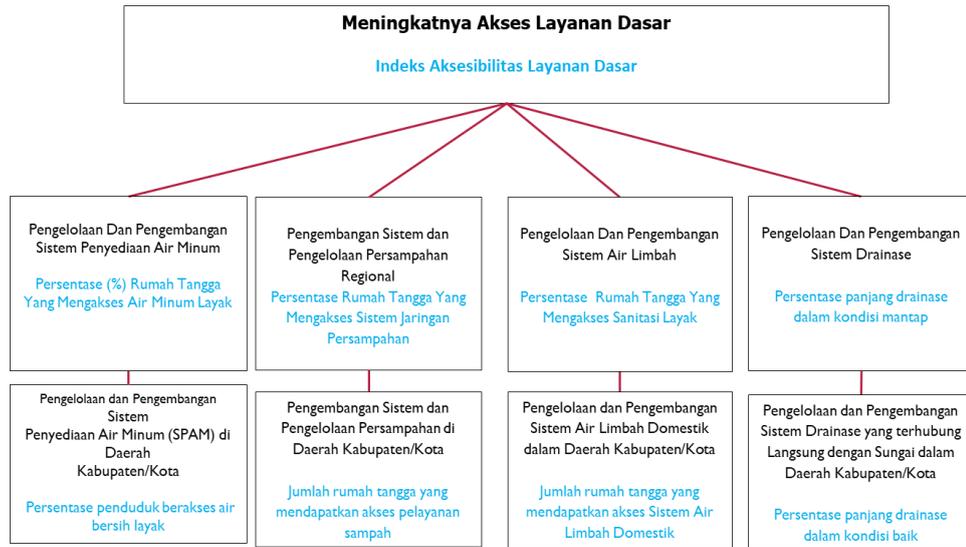
1.2 Cascading dan Struktur Organisasi

Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2021-2026

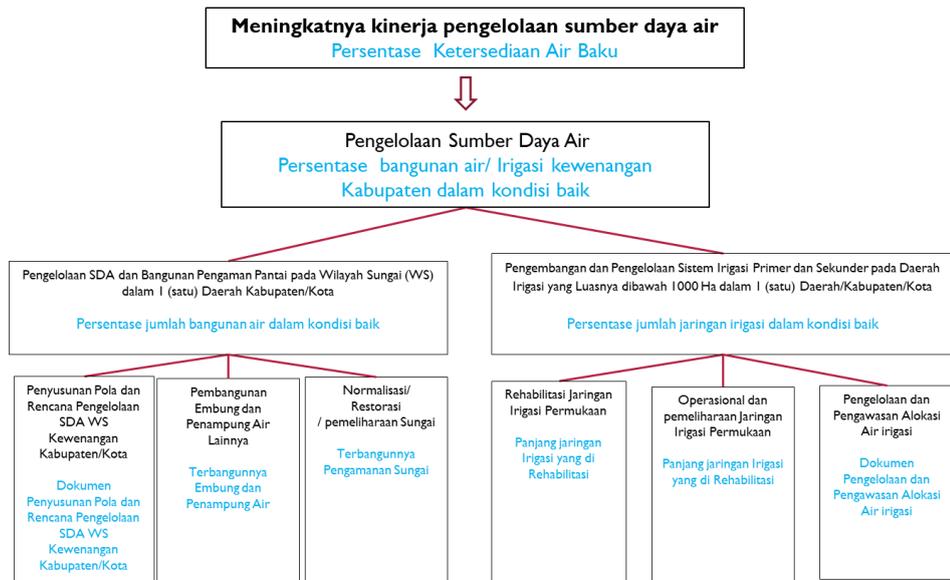
Gambar 1.1 Cascading DPUTARU



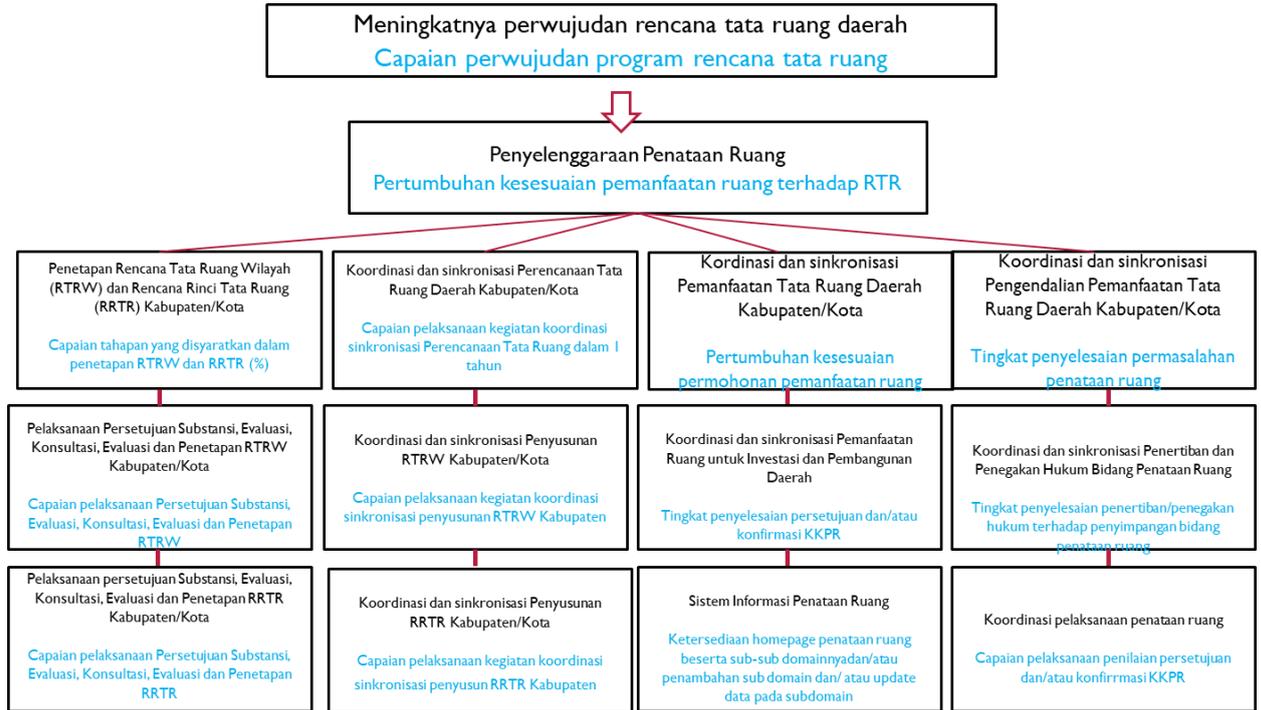
Sasaran 2



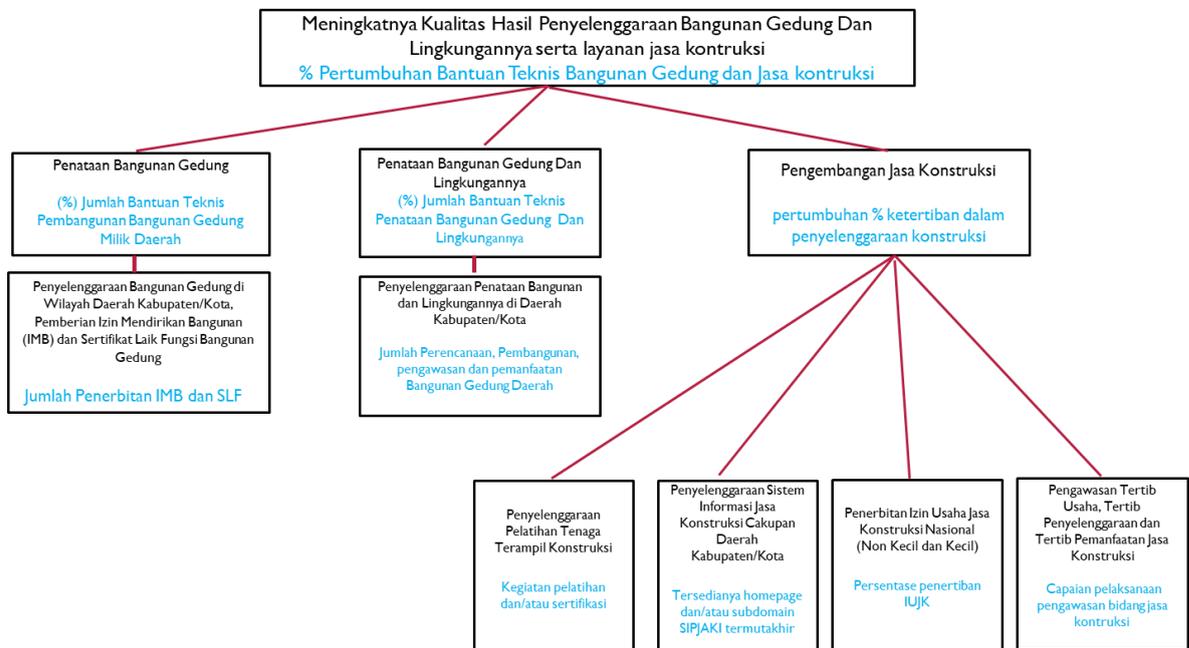
Sasaran 3



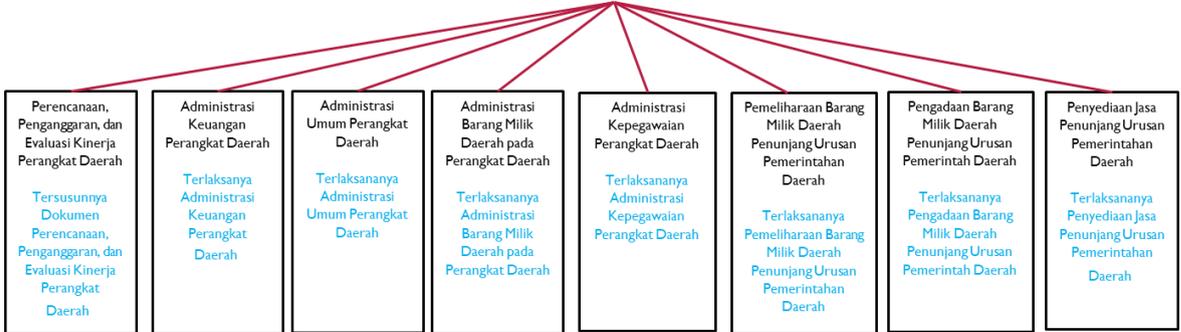
Sasaran 4



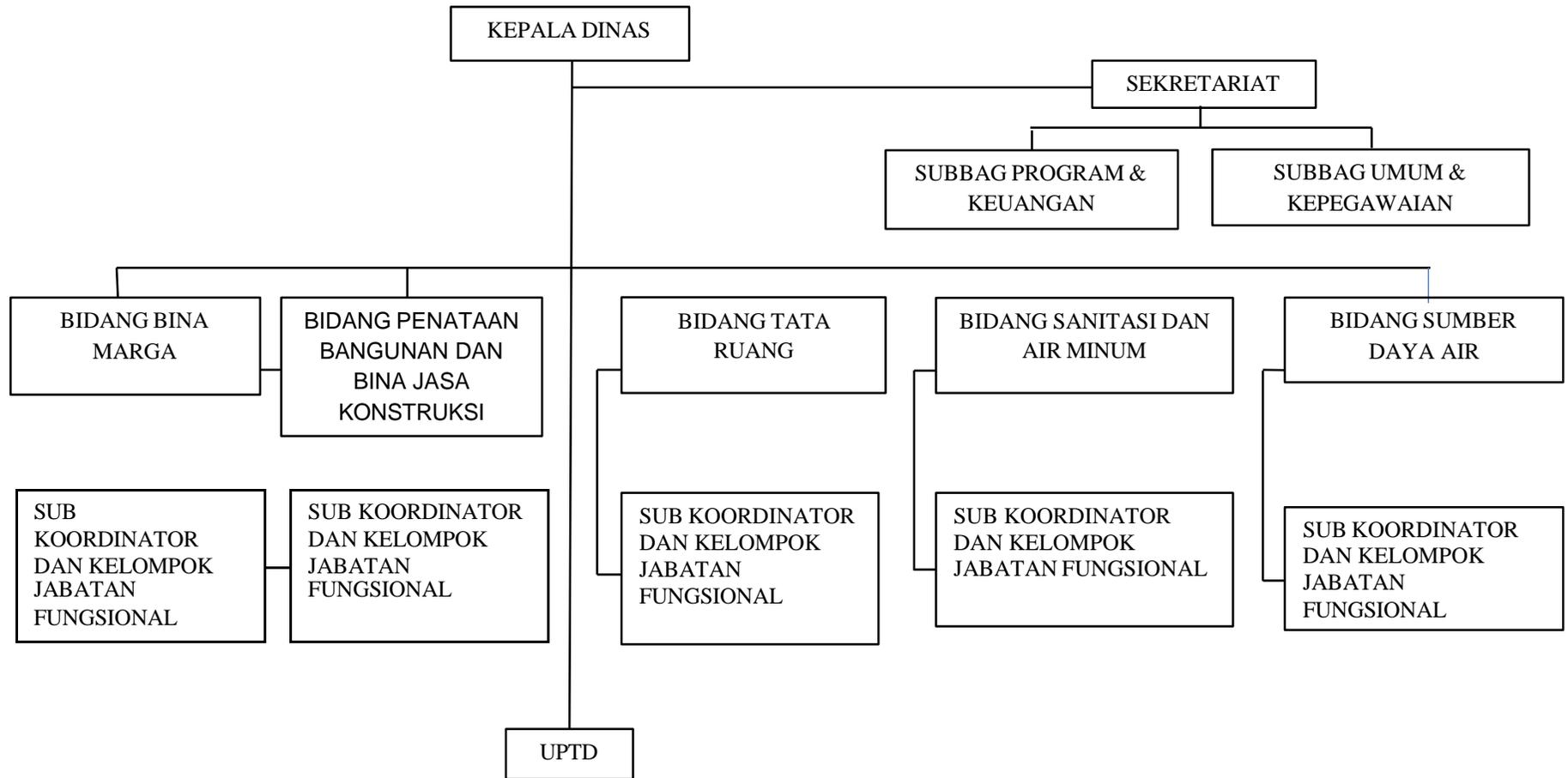
Sasaran 5



Sasaran 6
 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan, pelaksanaan program kegiatan, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik
 Nilai SAKIP OPD



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang :
 Gambar 1.2 Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Sumber: Peraturan Bupati No 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris terdiri dari :

1. Ka Sub Bagian Program dan Keuangan terdiri dari :

- Penata Keuangan
- Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
- Pengelola Keuangan
- Pengelola Gaji

2. Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :

- Analis Kelembagaan
- Pengelola Kepegawaian
- Pengadministrasi Umum
- Petugas Keamanan
- Pengemudi

- c. Kepala Bidang Bina Marga terdiri dari :
1. JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya
 2. JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
 3. Sub Koordinasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 - Analis Jalan Jembatan
 - Pengawas Jalan dan Jembatan
 - Pengelola Sistem Manajemen Jalan
 - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
 4. Sub Koordinasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan
 - Pengelola Pemeliharaan Jalan
 - Pemelihara Jalan
 - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
 5. Sub Koordinasi Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan
 - Analis Pengembangan Infrastruktur
 - Pengelola Kelengkapan Jalan
 - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
 - Teknik Jalan dan Jembatan Terampil/Pelaksana
- d. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari:
1. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya
 2. JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya
 3. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
 4. JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
 5. Sub Koordinator Penataan Bangunan
 - Analis Perumahan
 - Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan
 - Pengelola Bangunan Gedung
 - JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
 6. Sub Koordinator Bina Jasa Konstruksi
 - Analis Bangunan dan Perumahan
 - Penelaah Mutu Konstruksi
 - Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan
 - JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
- e. Kepala Bidang Tata Ruang terdiri dari :
1. JF Penata Ruang Madya
 2. JF Penata Ruang Ahli Muda
 3. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
 - Analis Tata Ruang

- Penyusun Rencana Tata Ruang
 - Pengelola Tata Ruang dan Konservasi Kawasan
 - JF Penata Ruang Ahli Pertama
4. Sub Koordinator Pemanfaatan Tata Ruang
 - Analis Tata Ruang
 - Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan
 - JF Penata Ruang Pertama
 5. Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
 - Analis Tata Ruang
 - Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan
 - JF Penata Ruang Pertama
- f. Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum terdiri dari :
1. JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya
 2. JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
 3. Sub Koordinator Sanitasi
 - Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
 - Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan
 - Pengelola Penyehatan Lingkungan
 - JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 - JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
 4. Sub Koordinator Penyediaan Air Minum
 - Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
 - Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi
 - JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
- g. Kepala Bidang Bidang Sumber Daya Air
1. JF Teknik Pengairan Ahli Madya
 2. JF Teknik Pengairan Ahli Muda
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
 - Analis Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Pengawas Pengairan
 - Pengelola Sumber Daya Air
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
 4. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Analis Potensi Sumber Air Tanah

- Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
5. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air
 - Pengelola Sumber Daya Air
 - Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - Penjaga Pintu Air
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
- h. Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan
1. Pengawas Sarana Bengkel
 2. Pengawas Pengoperasian Alat Berat
 3. Pengelola Bengkel
 4. Pemelihara Peralatan
 5. Operator Alat Berat

1.4 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan isu strategis memiliki dampak yang signifikan bagi daerah. Sebuah isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan memiliki peranan dalam menentukan pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah di masa mendatang.

Salah satu Isu KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah Masih belum mantapnya infrastruktur. Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena penyediaan infrastruktur berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kesembilan yang menyatakan, “Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi” dan berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kesebelas yang menyatakan.”Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”.

Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial daerah. Beberapa komponen yang termasuk dalam infrastruktur meliputi infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, dan infrastruktur sistem drainase. Keberadaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dalam upaya memenuhi kebutuhan air baku untuk minum, irigasi, dan industri. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2018 mencakup 19.961,45 ha dari luas area irigasi 21.193,45 ha. Meskipun kinerja sudah baik, tetapi cakupan ketersediaan air baku masih sangat kurang sebagai prasarana penunjang pembangunan industri, pertanian, dan konsumsi atau kebutuhan sehari-hari.

Kemudian berkaitan dengan jaringan jalan. Pada tahun 2019 Kabupaten Rembang mempunyai panjang jalan 379,59 km dengan kondisi jalan baik 59,06%. Kondisi jalan baik mengalami penurunan sebab dilalui jalan arteri primer antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang sehingga memiliki arus lalu lintas yang cukup padat. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 642,75 km, Jalan Provinsi sepanjang 31,64 km, dan Jalan Nasional sepanjang 88,04 km. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Rembang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.239,9 m.

Terdapat beberapa program yang masih harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah diantaranya program reaktifasi kereta api lintas Semarang-Demak Kudus-Pati-Rembang. Program ini sudah mulai dicanangkan dan diharapkan memberikan dampak yang cukup signifikan termasuk dalam Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). Program pengembangan pelabuhan juga direncanakan melalui pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo di Kecamatan Sluke diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi wilayah. Kondisi ini menggambarkan bagaimana infrastruktur yang ada masih perlu terus diperbaiki dan dikembangkan guna mendukung perkembangan Kabupaten Rembang.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur antara lain:

- Kondisi infrastruktur sumber daya air perlu ditingkatkan melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air;
- Kondisi infrastruktur jalan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan, meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, dan pengembangan infrastruktur perhubungan di kawasan pesisir.

1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan sumberdaya manusia pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	4	8	12
2	SMP Sederajat	5	18	23
3	SMA Sederajat	41	71	112
4	D3	5	2	7
5	D IV/S1	45	23	68
6	S2	9	-	9
7	S3	-	-	-

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	40	1	41
3	Golongan III	27	14	41
4	Golongan IV	6	-	6
5	Golongan VII	-	1	1
6	Golongan IX	15	4	19

1.6 Sarana dan Prasarana (BMD)

Berikut tabel penyajian data asset, inventaris barang dan sarana/prasarana yang menunjang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Tabel 1.3.

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah	v		500
2	Bangunan/Gedung	v		10
3	Jalan Kabupaten	v		339
4	Jembatan	v		172
5	Waduk	v		78
6	Bendung	v		58
7	Bangunan Penguat Tebing/ Pantai	v		82
8	A.C.	v		23
9	Printer	v		42
10	Laptop	v		57
11	Slide Projektor	v		3
12	Buldozer	v		1
13	Crawler Exchavator	v		1
14	Dump Truck	v		3
15	Macadan Roller/Three Wheel Roler	v		10
16	Excavator PC 200	v		1
17	Mesin Pemotong Rumput	v		15
18	Pick Up	v		3
19	Sepeda Motor Roda 3	v		2
20	Vibrator Roller	v		1
21	Truck + Attachment	v		3
22	Track Loader	v		2
23	Tandam Roller	v		8
24	Mobil Station Wagon	v		5
25	Road Maintenance Truck	v		1
26	Sepeda Motor	v		33
27	Stamper	v		1

1.7 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB REMBANG.

Tabel 1.4
Anggaran Tahun 2023 dan 2024

	Kode Rekening		Uraian	Sebelum (Rp.)	Setelah (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)
						(Rp)
Anggaran Tahun 2023	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.375.000.000	5.375.000.000	0
	4	1 02	Retribusi Daerah	5.345.000.000	5.345.000.000	0
	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000	30.000.000	0
	5	1	BELANJA OPERASI			
	5	1 01	Belanja Pegawai	8.932.644.800	7.568.132.900	(1.364.511.900)
	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.918.556.600	10.433.923.453	(1.484.633.147)
	5	1 05	Belanja Hibah	3.823.000.000	4.023.000.000	200.000.000
	5	2	BELANJA MODAL	142.483.966.400	163.537.202.838	21.053.236.438
	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606.810.400	5.912.675.000	5.305.864.600
	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.407.000.000	9.799.720.000	(25.607.280.000)
	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.470.156.000	147.824.807.838	41.354.651.838
			Jumlah Belanja	167.158.167.800	185.562.259.281	18.404.091.481
Anggaran Tahun 2024	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.180.000.000	6.180.000.000	0
	4	1 02	Retribusi Daerah	6.080.000.000	6.080.000.000	0
	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000	100.000.000	0
	5	1	BELANJA OPERASI	24.358.739.000	28.296.660.474	3.937.921.474
	5	1 01	Belanja Pegawai	8.680.873.167	8.991.839.228	310.966.061
	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.222.709.833	11.650.065.246	3.427.355.413
	5	1 05	Belanja Hibah	7.455.156.000	7.654.756.000	199.600.000
	5	2	BELANJA MODAL	35.131.664.000	35.497.486.837	365.822.837
	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.640.000	104.877.500	57.237.500
	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.700.000.000	181.897.850	(1.518.102.150)
	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.384.024.000	35.210.711.487	1.826.687.487
			Jumlah Belanja	59.490.403.000	63.794.147.311	4.303.744.311

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPUTARU Kab Rembang

Tabel 1.5
Sumber Dana Anggaran Tahun 2024

Sumber Dana	Anggaran (Rp.)
Jumlah Anggaran	63.794.147.311,00
Anggaran dari Pemerintah Kabupaten	35.032.028.311,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	8.882.683.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	3.498.716.000,00
DAK Fisik- Bidang Air Minum Penugasan	3.704.824.000,00
Insentif Fiskal	12.675.896.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPUTARU Kab Rembang

Terlihat pada Tabel 1.4 untuk Tahun Anggaran 2024 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang semula Rp.59.490.403.000,00 setelah Pergeseran 8 Anggaran adalah sebesar Rp 63.794.147.311, 00. Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terlihat pada Tabel 1.5 berasal dari APBD Kabupaten dan Sumber Dana dari Pusat.

Tabel 1.6

REKAPITULASI TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL SAKIP TAHUN 2023

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
1. Perencanaan Kinerja						
1	Untuk mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang agar dokumen perencanaan anggaran yang mendukung agar ditetapkan dengan ditandatangani dan distempel.	Dokumen perencanaan anggaran yang ditetapkan telah ditandatangani dan distempel	dokumen	Dokumen perencanaan anggaran yang ditetapkan telah ditandatangani dan distempel	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1mUegmxGM6VU-SKDzKI7FFny1mxuCJ_23/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sXaTylzedukL-4zAmFbjF6_0yLSC9m6/view?usp=sharing
						https://drive.google.com/file/d/1QeKWqLcPZTog6IKMjZE OaqHgokWkELDk/view?usp=sharing
2	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan /Diklat) menyelenggarakan Bintek penyusunan Penjenjangan Kinerja / Pohon Kinerja	Mengikuti penyelenggaraan Bintek penyusunan Penjenjangan Kinerja / Pohon Kinerja	kegiatan	Terselenggarakannya Bintek penyusunan Penjenjangan Kinerja / Pohon Kinerja (teori) namun belum sampai di tahap praktek	Tuntas	
	Menyelaraskan indikator sasaran pada penjenjangan kinerja (pohon kinerja) sesuai dengan Perubahan IKU yang final	Menyelaraskan indikator sasaran pada penjenjangan kinerja (pohon kinerja) sesuai dengan Perubahan IKU yang final	dokumen	Penjenjangan kinerja (pohon kinerja) sesuai dengan Perubahan IKU yang final	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1Nyc8pRLlLhvgMGTRTihMDmaJMn1BGPWg/view?usp=sharing

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
						https://docs.google.com/presentation/d/1WvRsd-df-YIBjYFdrzTLj0BBMhFYAmUN/edit?usp=sharing&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true
3	Merevisi penjenjangan kinerja dengan memperhatikan faktor kunci dan unsur logis atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Melakukan revisi penjenjangan kinerja dengan memperhatikan faktor kunci dan unsur logis atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	Penjenjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Tuntas	https://docs.google.com/presentation/d/1WvRsd-df-YIBjYFdrzTLj0BBMhFYAmUN/edit?usp=sharing&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true
4	Untuk Menyajikan data Rencana Aksi dengan Laporan Monitoring Kinerja secara berkala/triwulanan.	Menyajikan data Rencana Aksi dengan Laporan Monitoring Kinerja secara berkala/triwulanan.	dokumen	Data Rencana Aksi dengan Laporan Monitoring Kinerja secara berkala/triwulanan.	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KqtDaVyLBgOXfVqcGF56GKKIdJqwLhFW/edit?usp=sharing&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true
5	Menyusun dokumen tindaklanjut atas rekomendasi/saran berdasarkan reviu/evaluasi terhadap dok Perencanaan kinerja sebelumnya (renstra/RKT/Renja/PK.Renaksi).	Dokumen tindaklanjut atas rekomendasi/saran berdasarkan reviu/evaluasi terhadap dok Perencanaan kinerja sebelumnya (renstra/RKT/Renja/PK.Renaksi).	dokumen	Dokumen tindaklanjut atas rekomendasi/saran berdasarkan reviu/evaluasi terhadap dok Perencanaan kinerja sebelumnya (renstra/RKT/Renja/PK.Renaksi).	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17_hqcpFvT_LTNW9XCfzVhq42j2vSGkCS/edit?usp=sharing&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
6	Menyusun dokumen realisasi/capaian kinerja masing-masing bidang/seksi (berdasarkan analisis laporan Kinerja Triwulanan).	Membuat dokumen realisasi/capaian kinerja masing-masing bidang/seksi (berdasarkan analisis laporan Kinerja Triwulanan).	Dokumen realisasi/capaian kinerja masing-masing bidang/seksi (berdasarkan analisis laporan Kinerja Triwulanan).	Dokumen realisasi/capaian kinerja masing-masing bidang/seksi (berdasarkan analisis laporan Kinerja Triwulanan).	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yl_HjdRRtHV2qGF6xV3nrsczTvhsZl6/edit?usp=sharing&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true
2. Pengukuran Kinerja						
1	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	dokumen	Unit organisasi untuk membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1ZL-oFHAMif9p5Jubi7t5q3QW5UsZuq2x/view?usp=sharing

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
2	Menyajikan Media / Laporan Pemantauan atas pengukuran Capaian Kinerja Unit organisasi Triwulanan/semesteran, dokumentasi, Daftar Hadir & notulensi hasil pemantauan secara berjenjang.	Media / Laporan Pemantauan atas pengukuran Capaian Kinerja Unit organisasi Triwulanan/semesteran, dokumentasi, Daftar Hadir & notulensi hasil pemantauan secara berjenjang.	dokumen	Laporan Pemantauan atas pengukuran Capaian Kinerja Unit organisasi Triwulanan/semesteran, dokumentasi, Daftar Hadir & notulensi hasil pemantauan secara berjenjang.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/17YbShMHxPCakj17BsF94nLQIslipoIVL/view?usp=sharing
3	Menyajikan Laporan Kinerja Triwulanan oleh masing-masing unit kerja : sekretariat/Bidang/Seksi/UPT (berdasarkan Rencana Aksi)	Membuat Laporan Kinerja Triwulanan oleh masing-masing unit kerja : sekretariat/Bidang/Seksi/UPT (berdasarkan Rencana Aksi)	dokumen	Laporan Kinerja Triwulanan oleh masing-masing unit kerja : sekretariat/Bidang/Seksi /UPT (berdasarkan Rencana Aksi)	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KqtDaVyLBg0XfVqcGF56GKKIdJqwLhFW/edit?usp=sharing&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true
4	Menyajikan Dokumentasi, Daftar Hadir & Notulen rapat monev pengukuran kinerja triwulanan.	Membuat Dokumentasi, Daftar Hadir & Notulen rapat monev pengukuran kinerja triwulanan.	dokumen	Dokumentasi, Daftar Hadir & Notulen rapat monev pengukuran kinerja triwulanan.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1o3KAXjJ64NGaZjWsc1IBggPfw1nRHxt/view?usp=sharing
3. Pelaporan Kinerja						
1	Pelaporan kinerja telah disusun tepat waktu dan menyajikan informasi pencapaian indikator kinerja utama sehingga tidak ada rekomendasi.				Tuntas	
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
1	Untuk menyusun dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Atas Implementasi SAKIP PD secara formal tahun 2023.	Menyusun dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Atas Implementasi SAKIP PD secara formal tahun 2023.	dokumen	Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Atas Implementasi SAKIP PD secara formal tahun 2023.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1D2fiQ9YFPmZl4f9QaqRpxRvP6p6TPzTR/view?usp=sharing

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
2	Menyusun dokumen Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP (Hasil Penilaian Mandiri) yang telah sesuai format Laporan yang diatur Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Menyusun dokumen Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP (Hasil Penilaian Mandiri) yang telah sesuai format Laporan yang diatur Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	dokumen	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP (Hasil Penilaian Mandiri) yang telah sesuai format Laporan yang diatur Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1D2fiQ9YFPmZl4f9QaqRpxRvP6p6TPzTR/view?usp=sharing
3	Untuk menyusun dokumen Atas Evaluasi Implementasi AKIP Internal secara mendalam yang ditandatangani oleh Pimpinan PD.	Menyusun dokumen Atas Evaluasi Implementasi AKIP Internal secara mendalam yang ditandatangani oleh Pimpinan PD.	dokumen	Dokumen Atas Evaluasi Implementasi AKIP Internal secara mendalam yang ditandatangani oleh Pimpinan PD.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1D2fiQ9YFPmZl4f9QaqRpxRvP6p6TPzTR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TVD2SFR1XFxU7fsTlq4yGe0DyNEhHF-G/view?usp=sharing
4	Menyusun dokumen Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Atas Implementasi SAKIP yang telah sesuai format Laporan yang diatur Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Menyusun dokumen Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Atas Implementasi SAKIP yang telah sesuai format Laporan yang diatur Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	dokumen	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Atas Implementasi SAKIP yang telah sesuai format Laporan yang diatur Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan telah	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1D2fiQ9YFPmZl4f9QaqRpxRvP6p6TPzTR/view?usp=sharing

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
				ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.		
5	Untuk menyajikan Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang dilengkapi dengan RENAKSI beserta bukti dukungnya	Menyajikan Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang dilengkapi dengan RENAKSI beserta bukti dukungnya	dokumen	Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang dilengkapi dengan RENAKSI beserta bukti dukungnya	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17_hqcpFvT_LTNW9XCfzVhq42j2vSGkCS/edit?usp=sharing&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true
6	Untuk menyusun dokumen TL Hasil Rekomendasi yang dilengkapi dengan RENAKSI beserta bukti dukungnya.	Untuk menyusun dokumen TL Hasil Rekomendasi yang dilengkapi dengan RENAKSI beserta bukti dukungnya.	dokumen	Dokumen TL Hasil Rekomendasi yang dilengkapi dengan RENAKSI beserta bukti dukungnya.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1oCoXlmkZ-CHXjBquq9WTpQGeWAG1nAV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1YHKaLBY_Jc1yNncl6Rx-n5dB68hvaEA1/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-ozwJZdrfH6z9_mQoVPYpYH9d_m4yb9U/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/17_hqcpFvT_LTNW9XCfzVhq42j2vSGkCS/edit?usp=sharing&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true

1.8 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

1.9 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. IKU
2. PK Tahun 2024
3. SK Tim Penyusun LKJIP
4. SK SOP Pengumpulan Data Kinerja
5. Indikator Kinerja
6. Profil Prestasi yang diraih

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun
Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur		Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Na	58,05	61.61	66.88	70.44	
1.3.1		1.3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	Na	0.46	0.48	0.50	0.52
1.3.1		1.3.2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Na	69.87	72.93	76.13	79.2
1.3.1		1.3.2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	Na	40	45	55	60
1.3.1		1.3.2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Na	4	6	8	9
1.3.1		1.3.2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Na	46.6	47	48.3	50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.3.1		1.3 2.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Na	69,5	70,25	71,68	72,72

Sumber : Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	1.3.1.1# 0.1	Indeks Aksesibilitas Jalan	nilai	Jalan Dalam Kondisi Mantap	(panjang jalan kondisi mantap)/(Luas Wilayah Administrasi)	Bidang Bina Marga DPU TARU
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	1.3.1.2# 0.1	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	nilai	Persentase (%) Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sanitasi Layak, persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	(Capaian Air Minum+Air Limbah Domestik+drainase+persampahan)/3	Bidang Sanitasi dan Air Minum DPU TARU

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	1.3.1.3# 0.1	Persentase Ketersediaan Air Baku	prosentase	Persentase Ketersediaan Air Baku	(jumlah ketersediaan air baku)/(kebutuhan air baku) x 100%	Bidang Sumber Daya Air DPU TARU
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	1.3.1.4# 0.1	Capaian perwujudan Program Rencana Tata Ruang	prosentase	Capaian perwujudan program rencana tata ruang	(jumlah dokumen RTR yang ditetapkan)/(jumlah dokumen RTR yang direncanakan) x 100%	Bidang Tata Ruang DPUTA RU
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	1.3.1.5# 0.1	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	prosentase	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi	(Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun (n)-bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksis tahun (n-1))/(Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun n-1) x 100%	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi DPUTA RU

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		66.88
1.3.1		1.3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	nilai	0.50
1.3.1		1.3.2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	nilai	76.13
1.3.1		1.3.2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	prosentase	55
1.3.1		1.3.2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	prosentase	8
1.3.1		1.3.2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	prosentase	48.3
1.3.1		1.3.2.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD		70,35

Sumber : Rencana Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	30.801.000.000	35.075.274.000	4.274.274.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	30.801.000.000	35.075.274.000	4.274.274.000
	Pembangunan Jalan	23.201.000.000	24.459.030.000	1.258.030.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	0	50.800.000	50.800.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0	5.300.000	5.300.000
	Pembangunan Jembatan	100.000.000	128.463.919	28.463.919
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000	346.100.000	46.100.000
	Rehabilitasi Jalan	2.200.000.000	2.201.159.000	1.159.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.000.000.000	7.884.421.081	2.884.421.081
2. Meningkatkan Akses Layanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.839.824.000	3.839.824.000	0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.839.824.000	3.839.824.000	0
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.739.824.000	3.739.824.000	0
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000	100.000.000	0
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.588.716.000	3.588.716.000	0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.588.716.000	3.588.716.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	90.000.000	90.000.000	0
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.498.716.000	3.498.716.000	0
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000	295.582.000	(4.418.000)
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	286.582.000	(4.418.000)
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000	195.582.000	(4.418.000)
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000	100.000.000	0
3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.275.000.000	6.792.352.900	517.352.900
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	4.645.000.000	5.114.275.960	469.276.960
	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Tanggul Sungai	4.645.000.000	45.114.276.960	469.276.960
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.630.000.000	1.678.075.940	48.075.940
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.300.000.000	1.338.075.940	38.075.940
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000	310.000.000	10.000.000
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	30.000.000	30.000.000	0
4. Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	60.000.000	60.000.000	0
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR) Kabupaten/Kota)	30.000.000	30.000.000	0
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	0
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20.000.000	20.000.000	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	0
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	10.000.000	10.000.000	0
5. Meningkatkan Kualitas Hasil	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.127.000.000	2.516.600.000	389.600.000

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.127.000.000	2.516.600.000	389.600.000
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	2.100.000.000	2.3442.150.000	342.150.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	27.000.000	74.450.000	47.450.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.700.000.000	39.347.850	(1.660.652.150)
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000	39.347.850	(1.660.652.150)
	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.700.000.000	39.347.850	(1.660.652.150)
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	13.000.000	13.000.000	0
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000	13.000.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)	
	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	13.000.000	13.000.000	0	
6. Meningkatkan a kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatny a akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.785.863.000	11.573.450.561	787.587.561	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0	(5.000.000)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	0	(2.000.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.633.923.167	8.944.089.228	310.166.061	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.404.878.000	8.641.857.561	236.979.561	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.045.167	302.231.667	73.186.500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.400.000	14.400.000	0	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000	14.400.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	380.000	380.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	380.000	380.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.182.297	143.182.297	0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.072.750	6.072.750	0

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.732.400	5.732.400	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	9.000.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.430.147	31.126.147	(9.214.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	Penyediaan Bahan/Material	31.000.000	28.360.000	(2.640.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	57.891.000	17.891.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	50.237.500	237.500
	Pengadaan Mebel	50.000.000	50.237.500	237.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	237.500	237.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.742.044.000	2.219.811.000	477.767.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.200.000	125.400.000	(25.800.000)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.700.000	4.700.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.585.144.000	2.088.711.000	503.567.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.350.536	201.350.536	5.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.980.536	63.980.536	3.000.000

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	120.000.000	120.000.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.870.000	4.870.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.500.000	12.500.000	2.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Akseibilitas Jalan	0.5
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76.13
1.3.1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	48.3
1.3.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,35

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap	80
1.3.1.1.1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik, persentase jalan dalam kondisi baik	80
1.3.1.1.1.1.1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20
1.3.1.1.1.1.2	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	50
1.3.1.1.1.1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	3
1.3.1.1.1.1.4	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	40

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.1.1. 1.5	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1
1.3.1.1.1. 1.6	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20
1.3.1.1.1. 1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	60
1.3.1.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	99.4
1.3.1.2.1. 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	99.4
1.3.1.2.1. 1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10
1.3.1.2.1. 1.2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000
1.3.1.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PersentaseRumah Tangga Yang mengakses Sistem Air Limbah Layak	96
1.3.1.2.2. 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses Sistem Air Limbah Domestik	96
1.3.1.2.2. 1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan Dipelihara	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.2.2. 1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1000
1.3.1.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	30
1.3.1.2.3. 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	77
1.3.1.2.3. 1.1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000
1.3.1.2.3. 1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	2400
1.3.1.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	55
1.3.1.3.1. 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	55
1.3.1.3.1. 1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1
1.3.1.3.1. 1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	0
1.3.1.3.1. 1.3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.3.1. 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	55
1.3.1.3.1. 2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.5
1.3.1.3.1. 2.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5
1.3.1.3.1. 2.3	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	20
1.3.1.4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	95
1.3.1.4.1. 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan RTR	1
1.3.1.4.1. 1.1	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1
1.3.1.4.1. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	95
1.3.1.4.1. 2.1	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR	7
		sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	
1.3.1.4.1. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.4.1. 3.1	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	2
1.3.1.5.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	100
1.3.1.5.1. 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan IMB dan SLF	100
1.3.1.5.1. 1.1	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	4
1.3.1.5.1. 1.2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1
1.3.1.5.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	30
1.3.1.5.2. 1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan,	30

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	
1.3.1.5.2. 1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1
1.3.1.5.3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	10
1.3.1.5.3. 1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan kegiatan yang ada pada OPD di Kab Rembang	1
1.3.1.5.3. 1.1	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1
1.3.1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP dan Nilai IKM DPU Taru	70,35 77,90
1.3.1.6.1. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
1.3.1.6.1. 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2
1.3.1.6.1. 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.6.1. 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1
1.3.1.6.1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100
1.3.1.6.1. 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105
1.3.1.6.1. 2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
1.3.1.6.1. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100
1.3.1.6.1. 3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1
1.3.1.6.1. 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100
1.3.1.6.1. 4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48
1.3.1.6.1. 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.6.1. 5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1
		Penggandaan yang Disediakan	
1.3.1.6.1. 5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480
1.3.1.6.1. 5.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36
1.3.1.6.1. 6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100
1.3.1.6.1. 6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58
1.3.1.6.1. 6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31
1.3.1.6.1. 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.6.1. 7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5
1.3.1.6.1. 7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
1.3.1.6.1. 7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
1.3.1.6.1. 7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1.3.1.6.1. 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	95
1.3.1.6.1. 8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11
1.3.1.6.1. 8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	27
1.3.1.6.1. 8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36
1.3.1.6.1. 8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024

2.4 Profil Indikator Kinerja

Tabel 2.7
Profil Indikator Kinerja
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun 2024

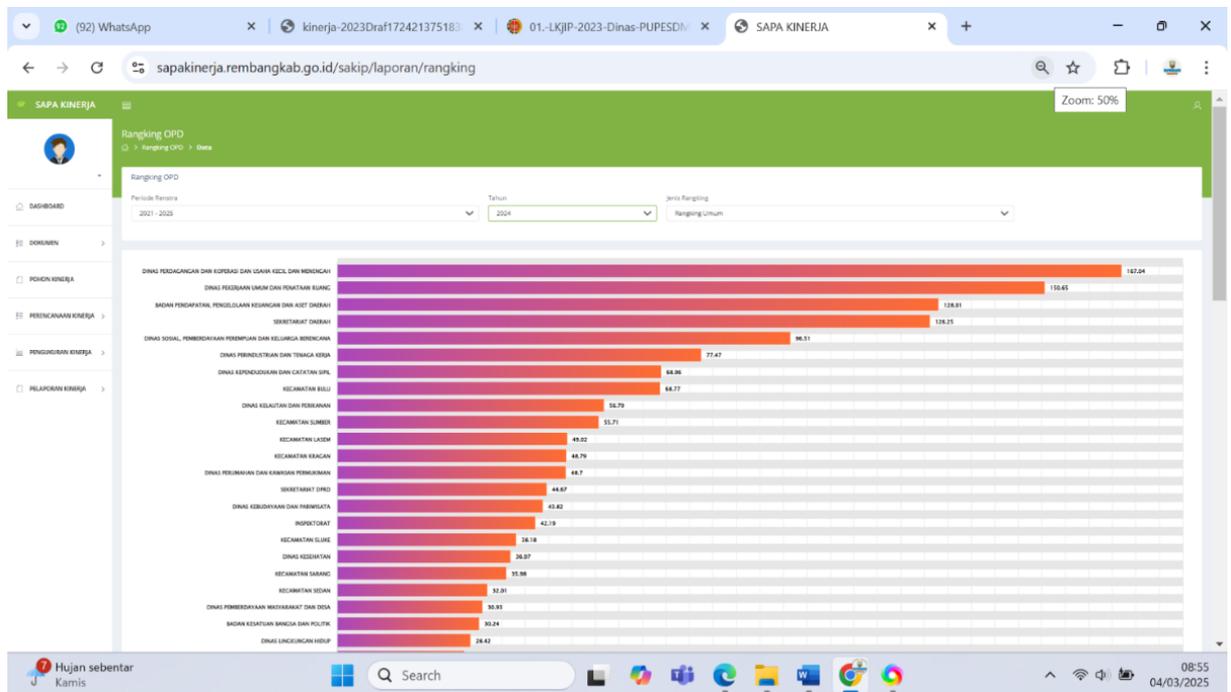
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.3. 1	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Infrastrukt ur	1.3.1.#. 1	Indeks Akses bilitas Infrastr uktur		salah satu indikator untuk melihat peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur di daerah	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur = (0,2 x Indeks Aksesibilitas Jalan) + (0,3 x Indeks Akses Layanan Dasar) + (0,1 x Persentase Ketersediaan Air Baku) + (0,1 x Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang) + (0,3 x Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi).	DPU TARU
1.3. 1.1	Meningkat nya pemerataan dan kualitas pembangu nan jalan dan jembatan	1.3.1.1# 0.1	Indeks Aksebil itas Jalan	nilai	Jalan Dalam Kondisi Mantap	(panjang jalan kondisi mantap) / (Luas Wilayah Administrasi)	Bidang Bina Marga DPU TARU

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.3. 1.2	Meningkat nya Akses Layanan Dasar	1.3.1.2# 0.1	Indeks Akses ibilitas Layana n Dasar	nilai	Persentase (%) Rumah TanggaYang Mengakses Air Minum Layak,Persenta se Rumah Tangga Yang Mengakses Sanitasi Layak,persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	(Capaian Air Minum+Air Limbah Domestik+drai nase+persamp ahan)/3	Bidang Sanitasi dan Air Minum DPU TARU
1.3. 1.3	Meningkat nya Kinerja Pengelolaan	1.3.1.3# 0.1	Persent ase Keterse diaan	prosentase	Persentase Ketersediaan Air Baku	(jumlah ketersediaan air baku)/(kebutu	Bidang Sumber Daya Air DPU TARU
1.3.1. 6	Meningkat nya kualitas dokumen perencana an, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksana an program kegiatan, dan Meningkat nya akuntabilit as kinerja dan kualitas pelayanan publik	1.3.1.6# 0.1	Nilai SAKIP OPD		Nilai Sakip OPD	Nilai Sakip OPD	SEKRET ARIAT DPUTA RU

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilindungi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah Aplikasi SAPA KINERJA sebagai sarana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi oleh Pimpinan Instansi pemerintah maupun pimpinan unit kerja/perangkat daerah dalam mengidentifikasi perencanaan serta progres kinerja yang terintegrasi dari tingkat Instansi Pemerintah hingga Unit kerja/Perangkat Daerah.

Gambar 2.1 Screenshot Aplikasi SAPA KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.3 Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2024

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.1	Menciptakan aksesibilitas yang mudah dan baik terhadap pemanfaatan infrastruktur dalam wilayah	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66.88	36,75	54,95	Rendah	DPUTARU
1.3.1 .1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	0.50	0.41	81.60	Tinggi	Bidang Bina Marga DPUTARU
1.3.1 .2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76.13	76.45	100.42%	Sangat Tinggi	Bidang Sanitasi dan Air Minum DPUTARU
1.3.1 .3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55%	40.43%	73.51%	Sedang	Bidang Sumber Daya Air DPUTARU
1.3.1 .4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8	1	12,5%	Sangat Rendah	Bidang Tata Ruang DPUTARU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	48.3%	31.95%	66.16%	Sedang	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi DPUTARU
1.3.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70.35	70.56	100.29	Sangat Tinggi	SEKRETA RIAT DPUTARU

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menjelaskan bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari misi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Pada Tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang menetapkan Indikator Kinerja Yaitu Indeks Aksesibilitas Infrastruktur sebesar 66,88% dan di Tahun 2024 tercapai sebesar 36,75 kategori rendah.

Dari hasil pengukuran kinerja di atas bahwa pada tahun 2024 dengan formulasi perhitungan masing masing indikator sebagai berikut :

- a. Indeks Aksesibilitas Jalan ,Panjang Jalan Kondisi Mantap/Luas Wilayah Administrasi $(277.418+145.481)/1.036,76$ capaian kinerja sebesar 0,41% kategori Tinggi.
- b. Indeks Akses Layanan Dasar dengan formulasi perhitungan (capaian air minum+capaian air limbah domestik+persampahan/3 $(98,07+92,71+38,58/3)$ memiliki capaian 76.45% kategori Sangat Tinggi.
- c. Persentase ketersediaan air baku dengan formulasi perhitungan jumlah ketersediaan air baku/kebutuhan air baku x 100% $(335.561.183,71/829.939.965,91 \text{ dikalikan } 100\%)$ memiliki capaian 40.43% kategori Sedang.

- d. Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi dengan formulasi perhitungan (Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2024 – Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2023 dibagi Bantuan Teknis Bantuan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2023 dikali 100%) memiliki capaian $(351-266/266 \times 100\%)$ 31,95% dalam kategori Sedang.
- e. Sedangkan Prosentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang dengan perhitungan jumlah penetapan RDTR di Kabupaten Rembang tercapai 1 yaitu RDTR Lasem atau 12,50% kategori Sangat Rendah, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa melaksanakan program kegiatan secara optimal.

3.4 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2021, 2022, dan 2023

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	72,63	38,15	36,82	66,88	36,75	54,95
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	Na	0,02	0,41	0,50	0,41	81,60
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Na	52,67	73,44	76,13	76,45	100,42%
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	35%	29,90%	30,70%	55%	40,43%	73,51%
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Na	3	2	8	1	12,5%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Na	47,30%	47,78%	48,3%	31,95%	66,16%
1.3.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	69,68	70,40	70,56	70,35	70,56	100,29

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Berdasarkan Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur dimana pada Tahun 2024 Realisasi tujuan tersebut sebesar 36,75 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 36,82 dan Tahun 2022 sebesar 38,15 hal ini terjadi karena beberapa angka realisasi capaian sasaran mengalami penurunan.

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari misi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan dengan Indikator Kinerja Indeks Aksesibilitas Jalan ada diangka yang sama dari Tahun 2023 yaitu sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 0,02 mengalami peningkatan yang cukup baik.

Sasaran 2. Meningkatnya Akses Layanan Dasar dengan Indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar Tahun 2024 sebesar 76,45 mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir dari Tahun 2022 sebesar 52,67 dan Tahun 2023 sebesar 73,44.

Sasaran 3. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku Tahun 2024 sebesar 40,43% mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 35%, Tahun 2022 sebesar 29,90 dan Tahun 2023 sebesar 30,70%.

Sasaran 4. Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah dengan Indikator Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang Tahun 2024 tercapai 1 dokumen mengalami penurunan dari Tahun 2022 tercapai 3 dokumen, Tahun 2023 tercapai 2 dokumen. Hal ini terjadi karena diperlukan anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan target secara optimal.

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi dengan Indikator % Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2024 realisasi sebesar 31,95% mengalami penurunan dari Tahun 2022 sebesar 47,30%, dan Tahun 2022 sebesar 47,30%. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dengan Indikator Nilai SAKIP OPD Tahun 2024 sebesar 70,56% mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 69,68%, Tahun 2022 sebesar 70,40 dan Tahun 2023 sebesar 70,56%

3.5 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	36,75	66,88	54,95
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,41	0,50	81,60
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76,45	76,13	100,42%
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	40,43	55	73,51%
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	1	8	12,5%
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	31,95	48,3	10,89%
1.3.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,56	70,35	100,29

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Dari Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur dimana pada Tahun 2024 Realisasi kinerja Indeks Aksesibilitas Infrastruktur hingga tahun ini tercatat sebesar 36,75, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 66,88. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh baru mencapai sekitar 54,9% dari target yang diharapkan. Realisasi yang

jauh lebih rendah dari target menunjukkan adanya keterlambatan atau hambatan dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas infrastruktur.

Sasaran 1 *Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Indeks Aksesibilitas Jalan tahun ini: 0,41
- Target jangka menengah: 0,50

Capaian hingga saat ini sekitar 81,60% dari target yang telah ditetapkan adanya capaian di bawah target realisasi menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas aksesibilitas jalan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana strategis.

Sasaran 2 *Meningkatnya Akses Layanan Dasar*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar tahun ini: 76,45
- Target jangka menengah: 76,13

Realisasi kinerja sebesar 76,45 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 76,13 (100,42% dari target). Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air minum layak dan sanitasi layak. Program peningkatan akses layanan dasar telah berjalan secara efektif.

Sasaran 3: *Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Persentase Ketersediaan Air Baku tahun ini: 40,43%
- Target jangka menengah: 55%

Realisasi kinerja baru mencapai sekitar 73,5% dari target yang ditetapkan, menunjukkan adanya kesenjangan dari target yang seharusnya dicapai. Hal ini berdampak pada ketersediaan air baku masih belum optimal pada sektor rumah tangga, pertanian, dan industri.

Sasaran 4 *Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi capaian dokumen rencana tata ruang tahun ini: 1 dokumen
- Target jangka menengah: 8 dokumen

Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi baru mencapai 12,5% dari target yang telah ditetapkan, Capaian Kinerja di Bawah Target hal ini menunjukkan Perencanaan dan perwujudan tata ruang daerah masih sangat terbatas sehingga target yang ditetapkan belum dapat dicapai secara optimal.

Sasaran 5 *Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi hingga ini: 31,95%
- Target jangka menengah: 48,3%

Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi baru mencapai 66,16% dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi masih belum maksimal serta adanya hambatan dalam penyelenggaraan layanan yang menyebabkan pertumbuhan lebih lambat dari yang diharapkan.

Sasaran 6 *Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Ketepatan capaian target kinerja, Ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Nilai SAKIP OPD tahun ini: 70,56
- Target jangka menengah: 70,35

Capaian kinerja telah melampaui target. Adanya peningkatan dalam pengelolaan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan cukup baik, serta adanya peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi program serta akuntabilitas kinerja.

3.6 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Kabupaten Blora diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.3. 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	36,75	Na	-
1.3. 1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,41	Na	-

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
	pembangunan jalan dan jembatan				
1.3. 1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76,45	Na	-
1.3. 1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	40,43	Na	-
1.3. 1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	1	Na	-
1.3. 1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	31,95	Na	-

Sumber : Berbagai sumber yang relevan seperti BPS, dsb

Dari Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 *Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan dengan indikator Indeks Aksesibilitas Jalan*

Dari Indeks Aksesibilitas Jalan ada indikator terkait yang dapat diperbandingkan untuk memberikan gambaran mengenai aksesibilitas jalan diantaranya :

- Persentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Rembang 71,17 %
- Persentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Blora 62,34 %

Sasaran 2 *Meningkatnya Akses Layanan Dasar dengan Indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar*

Dari Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar ada beberapa indikator terkait yang dapat diperbandingkan untuk memberikan gambaran mengenai aksesibilitas layanan dasar diantaranya :

- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen),2024
Kabupaten Rembang 92,84%
Kabupaten Blora 95,30%

- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Klasifikasi Desa (Persen), 2024
Kabupaten Rembang 92,75%
Kabupaten Blora 90,14%
- Persentase Drainase Kondisi Baik (Persen), 2024
Kabupaten Rembang 84,98%
Kabupaten Blora 65%

Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air

Dari Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku ada beberapa indikator terkait namun tidak dapat diperbandingkan karena memiliki indikator yang berbeda diantaranya :

- Kab. Blora menggunakan indikator Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi sebesar 53,82%.
- Kab. Rembang menggunakan indikator rasio jaringan irigasi kondisi baik sebesar 27,96%.

Sasaran 4 Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah

Dari Indikator Capaian perwujudan program rencana tata ruang ada indikator terkait yang dapat diperbandingkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator capaian perwujudan program rencana tata ruang diantaranya :

- Kab. Blora menggunakan indikator Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 100%.
- Kab. Rembang menggunakan indikator Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR sebesar 100%.

Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi

Dari Indikator Persentase pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi ada beberapa indikator terkait yang dapat diperbandingkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator persentase Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi diantaranya :

- Kab. Blora menggunakan indikator Persentase Gedung yang memenuhi standar dan terevitalisasi sebesar 93,55%.
- Kab. Rembang menggunakan indikator Persentase Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung sebesar 100%.

Sasaran 6 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Ketepatan capaian target kinerja, Ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Dari Indikator Nilai SAKIP OPD ada indikator terkait yang dapat diperbandingkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator Nilai SAKIP OPD diantaranya :

- Kab. Blora menggunakan indikator persentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung capaian skor sakin sebesar 100%.
- Kab. Rembang menggunakan indikator Nilai SAKIP sebesar 70,56.

3.7 Capaian Kinerja Lainnya

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

a. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Tabel 3.6
Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

b. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 3.7
Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN (Rp.)
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET (2024)	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2260	setiap tahun	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	589	setiap tahun	3.839.824
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	1174	setiap tahun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	400	setiap tahun	3.588.716

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN (Rp.)
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET (2024)	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
		pengolahan air limbah domestik			Setempat/S PALD-S			

c. Anggaran SPM Pekerjaan Umum

Tabel 3.8
Anggaran Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	
		APBD	APBN
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	200.000.000	3.639.824.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	90.000.000	3.498.716.000

d. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel 3.9
Jumlah Personil Pengampu SPM

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	Strata 3	1
2	Strata 2	6
3	Strata 1	1
4	SLTA	5
5	SLTP	-
6	SD	-

e. Hasil Capaian

Tabel 3.10
Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Air Minum Sehari-hari

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENT ASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		jumlah yang harus dilayani (orang)	jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2260	2060	91,15	72,92

Tabel 3.11
Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan

No	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 X 100)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	589	539	91,51	18,30
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	589	539	91,51	18,30

Tabel 3.12
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		jumlah yang harus dilayani (orang)	jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1174	1174	100	80

Tabel 3.13
Indeks Pencapaian Mutu SPALD

No	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 X 100)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	400	400	100	20
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap	400	400	100	20

No	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 X 100)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)				

Tabel 3.14
Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	72,92+18,30=91,22	Tuntas Utama
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	80+20=100	Tuntas Paripurna

Tabel 3.15
Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian SPM

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	INTERNAL		
1	Anggaran	Keterbatasan Anggaran APBD	Penambahan Anggaran APBD
II	EKSTERNAL		
1	Sumber Mata Air	Keterbatasan Sumber Mata Air	Perluasan Peresapan Air dan Penampungan Air Baku

Tabel 3.16
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah Anggaran Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.839.824.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.839.824.000
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.739.824.000
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.588.716.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.588.716.000
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	90.000.000
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.498.716.000

3.8 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66.88	36,75	54,95		
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	0.50	0,41	81,60		
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76.13	76,45	100,42		
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55 %	40,43%	73,51%		
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8	1	12,5%		
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	48.3	31,95	66,16		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,35	70,56	100,29		

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Dari Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur dimana pada Tahun 2024 Realisasi kinerja Indeks Aksesibilitas Infrastruktur tahun ini tercatat sebesar 36,75, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 66,88. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh baru mencapai sekitar 54,9% dari target yang diharapkan. Realisasi yang jauh lebih rendah dari target menunjukkan adanya keterlambatan atau hambatan dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas infrastruktur.

Sasaran 1 *Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan*

Perbandingan Kinerja:

- Target : 0,50
- Realisasi Indeks Aksesibilitas Jalan Tahun 2024 : 0,41
- Capaian : 81,60%

menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas akses jalan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana strategis.

Faktor yang mempengaruhi:

- Hambatan Proyek Infrastruktur: Keterlambatan pembangunan jalan akibat faktor teknis atau cuaca.
- Terbatasnya Anggaran atau terlambatnya proses lelang proyek.
Solusi yang dapat dilakukan:
- Percepatan Proyek Prioritas: Fokus pada proyek strategis kabupaten yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap aksesibilitas.
- Optimalisasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien untuk paket pekerjaan yang sedang berjalan.
- Monitoring dan evaluasi rutin: Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja.

Sasaran 2 Meningkatkan Akses Layanan Dasar

Perbandingan Kinerja:

- Target : 76,13
- Realisasi Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar hingga tahun ini: 76,45
- Capaian : 100,42

Realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air minum layak dan sanitasi layak. Program peningkatan akses layanan dasar telah berjalan efektif.

Upaya peningkatan kedepan yang dapat dilakukan :

- Pemerataan Layanan: pada wilayah yang masih tertinggal dalam akses layanan dasar.
- Peningkatan Kualitas: Melakukan evaluasi rutin terhadap layanan yang sudah tersedia.
- Optimalisasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran secara efektif dan tepat guna.

Sasaran 3: Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air

Perbandingan Kinerja:

- Target : 55
- Realisasi Persentase Ketersediaan Air Baku hingga tahun ini: 40,43%
- Capaian: 73,51%

Realisasi kinerja mencapai sekitar 73,5% dari target yang ditetapkan, menunjukkan adanya kesenjangan dari target yang seharusnya dicapai. Hal ini berdampak pada ketersediaan air baku masih belum optimal pada sektor rumah tangga, pertanian, dan industri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Curah Hujan dan Perubahan Iklim → Kekeringan atau perubahan pola hujan dapat mengurangi sumber air baku.
- Keterbatasan Infrastruktur → Bendungan, waduk, atau sistem distribusi air yang belum maksimal.
- Pencemaran Sumber Air → Kualitas air yang tidak memenuhi standar mengurangi pasokan yang layak digunakan.
- Alih Fungsi Lahan → Berkurangnya daerah resapan air. Solusi yang dapat dilakukan antara lain :
 - Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air → Membangun dan merehabilitasi bendungan, waduk, dan saluran air.
 - Peningkatan Konservasi Sumber Air → Menggalakkan penghijauan dan perlindungan daerah resapan air.
 - Kolaborasi dengan Masyarakat dan Swasta → Mendorong peran serta berbagai pihak dalam menjaga dan mengelola sumber daya air.

Sasaran 4 Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah

Perbandingan Kinerja :

- Target : 8 dokumen
- Realisasi capaian dokumen rencana tata ruang hingga tahun ini: 1 dokumen
- Capaian : 12,5%

Menunjukkan bahwa realisasi baru mencapai 12,5% dari target yang telah ditetapkan, Capaian Kinerja masih di Bawah Target hal ini menunjukkan Perencanaan dan perwujudan tata ruang daerah masih sangat terbatas sehingga Target yang ditetapkan belum dapat dicapai secara optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Proses Penyusunan yang Panjang → Pembuatan dokumen rencana tata ruang memerlukan koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pihak.
- Kendala Regulasi dan Administrasi → Persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah sering mengalami keterlambatan.
- Kurangnya Sumber Daya → Keterbatasan tenaga ahli dan anggaran dalam penyusunan dokumen.
- Dinamika Wilayah → Perubahan penggunaan lahan yang cepat mempersulit perencanaan yang tepat dan efektif.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- Percepatan Penyusunan Dokumen → Menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat koordinasi antarinstansi.

- Peningkatan Kapasitas SDM → Menambah tenaga ahli dan pelatihan dalam perencanaan tata ruang.
- Pemanfaatan Teknologi GIS → Menggunakan sistem informasi geografis (GIS) untuk mempercepat analisis dan pemetaan tata ruang.
- Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan → Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan tata ruang.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala → Meninjau progres setiap tahap untuk memastikan dokumen dapat selesai sesuai jadwal.

Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi

Perbandingan Kinerja:

- Target : 48,3%
- Realisasi pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi hingga tahun ini: 31,95%
- Capaian : 66,16%

Capaian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi masih belum optimal serta adanya hambatan dalam penyelenggaraan layanan yang menyebabkan pertumbuhan lebih lambat dari yang diharapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Keterbatasan SDM Ahli → Jumlah tenaga teknis dan profesional di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi masih terbatas.
- Kendala Regulasi dan Perizinan → Proses birokrasi yang panjang memperlambat pengadaan dan pelaksanaan proyek.
- Anggaran yang Tidak Optimal → Keterbatasan anggaran menyebabkan berkurangnya program bantuan teknis.
- Kurangnya Pemanfaatan Teknologi → Digitalisasi dan sistem monitoring belum diterapkan dalam penyelenggaraan layanan.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- Percepatan Penyediaan SDM Ahli → Menambah pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di bidang bangunan dan jasa konstruksi.
- Penyederhanaan Regulasi → Mempercepat proses perizinan agar lebih efisien tanpa mengurangi aspek pengawasan dan keamanan.
- Optimalisasi Anggaran → Mengalokasikan dana lebih efektif untuk meningkatkan layanan bantuan teknis.
- Kolaborasi dengan Sektor Swasta → Menggandeng perusahaan konstruksi untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan bangunan.

Sasaran 6 *Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Ketepatan capaian target kinerja, Ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.*

Perbandingan Kinerja:

- Target : 70,35
- Realisasi Nilai SAKIP OPD hingga tahun ini: 70,56 Capaian : 100,29

Capaian kinerja telah melampaui target. Adanya peningkatan dalam pengelolaan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan cukup baik, serta adanya peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi program serta akuntabilitas kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Peningkatan Sistem Perencanaan → Perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih matang dan berbasis data.
- Evaluasi dan Monitoring yang Konsisten → Adanya laporan kinerja pertriwulan terhadap kinerja OPD.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas → Penguatan pelaporan dan keterbukaan informasi publik.
- Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Kinerja → Implementasi sistem digital/aplikasi dalam manajemen kinerja dan pelaporan.

Upaya peningkatan kedepan yang dapat dilakukan adalah :

- Peningkatan Kapasitas SDM →Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang SAKIP dan pengelolaan kinerja.
- Peningkatan Kualitas Layanan Publik→Fokus pada kepuasan masyarakat dengan layanan yang lebih cepat dan efisien.
- Penyempurnaan Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja→ Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

3.9 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	66.88	36,75	54,95	63.794.147.311	61.557.303.622		-75,6
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	0.50	0,41	81,60	35.075.274.000	33.953.505.926	96,80%	-18,63
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	76.13	76,45	100,42	7.724.122.000	7.328.307.360	94,88%	5,52%
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	55	40,43	73,51	6.792.352.900	6.608.154.178	97,29%	-32,35%
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	8	1	12,5	60.000.000	58.746.494		-683,28%
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi	48.3	31,95	66,16	2.568.947.850	2.429.630.611	94,58%	-42,96%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	70,35	70,56	100,29	11.573.450.561	11.178.959.053	96,59%	3,69%

Sumber : LAPORAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Dari tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran diperoleh hasil sebagai berikut :

- ✓ Pada Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -75,6%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja Efisien}} \times 100\%$$

$$= 100\% - 175,6\%$$

$$\text{Efisiensi} = -75,6\%$$

- ✓ Pada Sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -18,63%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}} \times 100\%$$

$$= 100\% - 118,63\%$$

$$= 100\% - 118,63\%$$

$$\text{Efisiensi} = -18,63\%$$

- ✓ Pada Sasaran Meningkatnya Akses Layanan Dasar dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar 5,52%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran masih efisien karena persentase rasio diangka positif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}$$

$$= 100\% - 94,48\%$$

$$\text{Efisiensi} = 5,52\%$$

- ✓ Pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -32,35%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}$$

$$= 100\% - 132,35\%$$

$$\text{Efisiensi} = -32,35\%$$

- ✓ Pada Sasaran Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -683,28%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}$$

$$= 100\% - 783,28\%$$

$$\text{Efisiensi} = -683,28\%$$

- ✓ Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -42,96%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}$$

$$= 100\% - 142,96\%$$

$$\text{Efisiensi} = -42,96\%$$

- ✓ Pada Sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas Pelayanan Publik dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar 3,69%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran masih efisien karena persentase rasio diangka positif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja Efisiensi}$$

$$= 100\% - 96,31\%$$

Efisiensi = 3,69%

3.10 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.19
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1.1.1	Meningkatnya pemerataan dan Kualitas pembangunan Jalan dan jembatan	Indeks Akseibilitas Jalan	0,41	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap	89	Menunjang	Pembangunan infrastruktur Untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik,persentase jalan dalam kondisi baik	89	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1.1				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	96	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1.2				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		
1.3.1.1.1.1.3				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-		
1.3.1.1.1.1.4				Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2,5	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1.5				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	59,42	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1.6				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	13	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.1. 1.1. 7				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	105	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3. 1.2. 1	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76,45	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	93	Menunjang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang Layak untuk kebutuhan masyarakat
1.3. 1.2. 1.1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	93	Menunjang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang Layak untuk kebutuhan masyarakat
1.3. 1.2. 1.1. 1				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	70	Menunjang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang Layak untuk kebutuhan masyarakat
1.3. 1.2. 1.1. 2				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		
1.3. 1.2. 2				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	97%	Menunjang	Pembangunan Sistem Air Limbah Layak Rumah Tangga
1.3. 1.2. 2.1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses Sistem Air Limbah Domestik	97	Menunjang	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Layak untuk Kebutuhan Rumah Tangga
1.3. 1.2. 2.1. 1				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	100	Menunjang	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Layak untuk Kebutuhan Rumah Tangga

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.2. 2.1. 2				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	40	Menunjang	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Layak untuk Kebutuhan Rumah Tangga
1.3. 1.2. 3				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	100	Menunjang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.3. 1.2. 3.1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	94	Menunjang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.3. 1.2. 3.1. 1				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	15	Menunjang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.3. 1.2. 3.1. 2				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	100	Menunjang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.3. 1.3. 1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	40,43	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	95	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.1				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	111	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.1. 1				Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	67	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.1. 2				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	-		
1.3. 1.3. 1.1. 3				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	-		
1.3. 1.3. 1.2				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	82	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.2. 1				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	18	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.2. 2				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	70	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.2. 3				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	100	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								ketahanan pangan
1.3. 1.4. 1	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.1				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan RTR	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.1. 1				Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.2. 1				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.3. 1				Pengawasan TURBINALA dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.5. 1	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung	31,95	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	100	Menunjang	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Bangunan Gedung

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan g/ Tidak Menunjan g	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dan Jasa Konstruksi						
1.3. 1.5. 1.1				Penyeleng araan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan IMB dan SLF	100	Menunjang	Penyelenggara an Bantuan Teknis Bangunan Gedung
1.3. 1.5. 1.1. 1				Bantuan Teknis Pembangu nan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentinga n Strategis Kabupaten /Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Ko ta	100	Menunjang	Penyelenggara an Bantuan Teknis Bangunan Gedung
1.3. 1.5. 1.1. 2				Penyeleng araan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilika n Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongk aran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100	Menunjang	Penyelenggara an Bantuan Teknis Bangunan Gedung

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan g/ Tidak Menunjan g	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.5. 2				PROGRAM PENATAA N BANGUNA N DA N LINGKUN G ANNYA	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	100	Menunjang	Penyelenggara an Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkunganny a
1.3. 1.5. 2.1				Penyelengg araan Penataan Bangunan dan Lingkunga nnya di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	100	Menunjang	Penyelenggara an Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkunganny a
1.3. 1.5. 2.1. 1				Pengawasa n Penataan Bangunan dan Lingkunga n	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	100	Menunjang	Penyelenggara an Bantuan Teknis Bangunan Gedung
1.3. 1.5. 3				PROGRA M PENGEM B ANGAN JASA KONSTRU KSI	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggara an konstruksi	100	Menunjang	Penyelenggara an tertib penyelenggara an konstruksi
1.3. 1.5. 3.1				Penyelengg araan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pendataan kegiatan yang ada pada OPD di Kab Rembang	100	Menunjang	Penyelenggara an tertib penyelenggara an konstruksi
1.3. 1.5. 3.1. 1				Peningkata n Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Menunjang	Penyelenggara an tertib penyelenggara an konstruksi
1.3. 1.6. 1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkny a akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,56	PROGRAM PENUNJA N G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT E N/KOTA	Nilai SAKI P Nilai IKM DPU Taru	70,56 88,77	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.1				Perencana an, Pengganga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.6. 1.1. 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.1. 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.1. 3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.2. 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.2. 2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.3. 1				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	1200	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			program kegiatan
1.3. 1.6. 1.4				Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.4. 1				Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawai an	Jumlah Paket Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5				Administra si Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 7				Penyediaan Bahan/Ma terial	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 8				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	93	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.6. 1				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.6. 2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7. 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7. 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7. 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7. 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Umum Kantor yang Disediakan			pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8. 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	436	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8. 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	81	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8. 3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8. 4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Jalan

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.075.274.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 33.953.505.000,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan Panjang jalan mantap/Panjang jalan kewenangan kabupaten (422,89/594,2x 100%) sebesar 71,17% dan realisasi keuangan sebesar 96,80% yang diarahkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat.

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.792.352.900,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.608.154.178,00. Adapun capaian realisasi kinerja dengan formulasi sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar 97,29% Program ini dilaksanakan untuk penanganan irigasi dan sumber daya air lainnya. Ada dua kegiatan yang mendukung terlaksananya program ini antara lain Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya program ini tentunya sangat membantu terlayannya ketersediaan sumber air untuk keperluan irigasi dan optimalnya fungsi jaringan irigasi sehingga ketahanan pangan dimasyarakat dapat terwujud.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.839.824.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.515.365.788,00. Adapun capaian realisasi kinerja diperoleh dari formulasi persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak/Jumlah Rumah Tangga x100% (201.400/216.925 x 100%) sebesar 93% dan realisasi keuangan sebesar 91,55%. Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sangat mendukung keberhasilan program ini.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.588.716.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.526.359.572,00. Adapun capaian realisasi kinerja diperoleh dengan formulasi Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sistem Air Limbah Domestik/Jumlah Rumah Tangga (201.198/216.925 x 100%) sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar 98,26%. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) sangat mendukung keberhasilan program ini.

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 295.582.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 286.582.000,00. Adapun realisasi capaian kinerja kinerja diperoleh dengan formulasi Persentase Panjang drainase dalam kondisi mantap sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,96% dengan adanya Pembangunan Sistem Drainase telah mendukung keberhasilan program ini.

6) Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.516.600.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.381.302.761,00. Adapun realisasi kinerja diperoleh dari formulasi persentase sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,62% yang diarahkan untuk mengendalikan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan lainnya dan melaksanakan penerbitan IMB dan SLF.

7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 39.347.850,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 39.347.850,00. Adapun realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100% yang diarahkan untuk kegiatan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan.

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.980.000,00. Adapun realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 69,08% yang dilaksanakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas pengelola SIPJAKI.

9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 58.746.494,00. Adapun capaian realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,91%. Kegiatan yang mendukung keberhasilan program ini adalah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Lasem dengan dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

10) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.573.450.561,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.178.959.053,00. Adapun capaian realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,59%. Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sangat mendukung tercapainya target program ini.

3.11 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.1. 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	35.075.274.000	33.953.505.926	96,80%
1.3.1.1. 1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	35.075.274.000	33.953.505.926	96,80%
1.3.1.1. 1.1.1	Pembangunan Jalan	24.459.030.000	23.988.047.654	98,07%
1.3.1.1. 1.1.2	Pemeliharaan Berkala Jalan	50.800.000	50.800.000	100%
1.3.1.1. 1.1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5.300.000	5.300.000	100%
1.3.1.1. 1.1.4	Pembangunan Jembatan	128.463.919	127.530.775	99,27%
1.3.1.1. 1.1.5	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	346.100.000	295.624.700	85,42%
1.3.1.1. 1.1.6	Rehabilitasi Jalan	2.201.159.000	2.178.649.997	98,98%
1.3.1.1. 1.1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.884.421.081	7.307.552.800	92,68%
1.3.1.2. 1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.839.824.000	3.515.365.788	91,55%
1.3.1.2. 1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.839.824.000	3.515.365.788	91,55%
1.3.1.2. 1.1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.739.824.000	3.511.419.788	93,89%
1.3.1.2. 1.1.2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000	3.946.000	3,95%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.2. 2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.588.716.000	3.526.359.572	98,26%
1.3.1.2. 2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.588.716.000	3.526.359.572	98,26%
1.3.1.2. 2.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	90.000.000	51.508.572	57,23%
1.3.1.2. 2.1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.498.716.000	3.474.851.000	99,32%
1.3.1.2. 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	295.582.000	286.582.000	96,96%
1.3.1.2. 3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	295.582.000	286.582.000	96,96%
1.3.1.2. 3.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	195.582.000	186.582.000	95,40%
1.3.1.2. 3.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000	100.000.000	100%
1.3.1.3. 1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.792.352.900	6.608.154.178	97,29%
1.3.1.3. 1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	5.114.276.960	4.962.179.428	97,03%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.3.1.3. 1.1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	5.114.276.960	4.962.179.428	97,03%
1.3.1.3. 1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.3.1.3. 1.1.3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.3.1.3. 1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.678.075.940	1.645.974.750	98,09%
1.3.1.3. 1.2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.338.075.940	1.307.677.750	97,73%
1.3.1.3. 1.2.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	310.000.000	308.297.000	99,45%
1.3.1.3. 1.2.3	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	30.000.000	30.000.000	100%
1.3.1.4. 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	60.000.000	58.746.494	97,91%
1.3.1.4. 1.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	30.000.000	29.397.494	97,99

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(RRTR) Kabupaten/Kota			
1.3.1.4. 1.1.1	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	30.000.000	29.397.494	97,99%
1.3.1.4. 1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.646.000	98,23%
1.3.1.4. 1.2.1	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20.000.000	19.646.000	98,23%
1.3.1.4. 1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.703.000	97,03%
1.3.1.4. 1.3.1	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	10.000.000	9.703.000	97,03%
1.3.1.5. 1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.516.600.000	2.381.302.761	94,62%
1.3.1.5. 1.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.516.600.000	2.381.302.761	94,62%
1.3.1.5. 1.1.1	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	2.442.150.000	2.343.802.761	95,97%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.5. 1.1.2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	74.450.000	37.500.000	50,37%
1.3.1.5. 2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	39.347.850	39.347.850	100%
1.3.1.5. 2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	39.347.850	39.347.850	100%
1.3.1.5. 2.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	39.347.850	39.347.850	100%
1.3.1.5. 3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	13.000.000	8.980.000	69,08%
1.3.1.5. 3.1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000	8.980.000	69,08%
1.3.1.5. 3.1.1	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	13.000.000	8.980.000	69,08%
1.3.1.6. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	11.573.450.561	11.178.959.053	96,59%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.3.1.6. 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		
1.3.1.6. 1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		
1.3.1.6. 1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0		
1.3.1.6. 1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		
1.3.1.6. 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.944.089.228	8.620.624.095	96,38%
1.3.1.6. 1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.641.857.561	8.323.984.095	96,31%
1.3.1.6. 1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302.231.667	296.640.000	98,15%
1.3.1.6. 1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.400.000	14.400.000	100%
1.3.1.6. 1.3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000	14.400.000	100%
1.3.1.6. 1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	380.000	380.000	100%
1.3.1.6. 1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	380.000	380.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.6. 1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.182.297	139.618.517	97,51%
1.3.1.6. 1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.072.750	6.000.000	98,80%
1.3.1.6. 1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.732.400	5.469.000	95,41%
1.3.1.6. 1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	8.996.625	99,96%
1.3.1.6. 1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	4.999.900	99,99%
1.3.1.6. 1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.126.147	31.121.050	99,98%
1.3.1.6. 1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
1.3.1.6. 1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	28.360.000	26.482.180	93,38%
1.3.1.6. 1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.891.000	56.549.762	97,68%
1.3.1.6. 1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.237.500	49.123.650	97,78%
1.3.1.6. 1.6.1	Pengadaan Mebel	50.000.000	48.886.150	97,78%
1.3.1.6. 1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.500	237.500	100%
1.3.1.6. 1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.219.811.000	2.156.397.491	97,14%
1.3.1.6. 1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.6. 1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.400.000	116.350.616	92,78%
1.3.1.6. 1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.700.000	4.700.000	100%
1.3.1.6. 1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.088.711.000	2.034.346.875	97,40%
1.3.1.6. 1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.350.536	198.415.300	98,54%
1.3.1.6. 1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.980.536	62.767.800	98,10%
1.3.1.6. 1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	120.000.000	118.337.500	98,61%
1.3.1.6. 1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.870.000	4.830.000	99,17%
1.3.1.6. 1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.500.000	12.480.000	99,84%

Sumber : Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran yang Dialokasikan

Total anggaran sebesar Rp. 63.794.147.311,00 merupakan anggaran yang direncanakan untuk mendukung berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun anggaran.

2. Realisasi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang terserap sebesar Rp. 61.557.303.622 menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah direalisasikan untuk mendukung pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan.

3. Capaian Kinerja

Persentase capaian: 96,49% berarti hampir seluruh target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah berhasil dicapai, menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan anggaran yang direalisasikan terhadap anggaran yang dialokasikan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{61.557.303.622}{63.794.147.311} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 96,49\%$$

Tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan dengan baik dengan efisiensi sebesar 96,49%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang telah mengelola sumber daya secara optimal dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Program, kegiatan dan sub kegiatan telah berjalan sesuai rencana dengan capaian kinerja yang tinggi telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

3.12 Prestasi yang dicapai

Kepatuhan Penataan Ruang, Pemkab Rembang Raih Peringkat Ketiga SIWASTEK Jawa Tengah



Gambar 3.1 Penghargaan Juara 3 Program SIWASTEK Tingkat Jawa Tengah

Kepatuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dalam penataan ruang membuahkan hasil. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah menobatkan Kabupaten Rembang sebagai juara ketiga se-Jawa Tengah dalam program SIWASTEK (Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang). SIWASTEK adalah sistem informasi pengawasan teknis berbasis web yang dirancang untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam penataan ruang. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan penataan ruang.

Penghargaan ini diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Sumarno, kepada Bupati Rembang yang diwakili oleh Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTaru) Kabupaten Rembang, Moh Nur Aziz, dalam seminar Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024 di Patra Hotel and Convention Semarang, Kamis (7/11/2024). Penilaian dalam ajang ini meliputi aspek perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam tata kelola ruang yang baik dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam hal penataan ruang.

3.21 Lintas Sektor

Tabel 3.21 Kegiatan Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kegiatan lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Program TMMD Sengkuyung dalam rangka Mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Rembang	TNI, DPUTARU, masyarakat	- TMMD Tahap I Sengkuyung Tahun 2024 kegiatan fisik yang berupa pembuatan jalan beton dan sepanjang 500 meter dengan lebar 2,5 meter Desa Karang Sari Kecamatan Sulang dan pembangunan talud sepanjang 250 meter dengan lebar 0,30 meter dan tinggi 1 meter Pembedonan ini akan memperbaiki akses dari Dukuh Trambalan (Karangsari) menuju Dukuh Setro (Sendang Agung)	Pembangunan fisik yang dilakukan untuk membantu progres pembangunan di desa.	Masyarakat Kabupaten Rembang	Bagi OPD : Mendukung pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan jembatan. Bagi Kelompok Sasaran : Dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
			- TMMD Tahap II rehabilitasi jalan dengan aspal Panjang 245 m, Pembangunan rabat beton dengan Panjang 270 m, Pembangunan talud dengan Panjang 42 m, jambanisasi 3 unit di Desa Sumber Kecamatan Sumber.			
			- TMMD Tahap III mencakup pembangunan jalan			

No.	Kegiatan lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			sepanjang 891 meter, terdiri dari jalan makadam dan jalan rambat beton dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 15 cm untuk jalan rambat beton Desa Labuhan Kidul dan Desa Bendo Kecamatan Sluke.			
			- TMMD Tahap IV Sengkuyung Tahun 2024 kegiatan fisik yang berupa jalan penghubung sepanjang 600 meter yang menghubungkan Desa Mojorembun dengan Maguan dan pembangunan talud, gorong-gorong.			
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2022-2042.	Ditjen Tata Ruang, Dinas Pusdataru Prov. Jawa Tengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), DPUTARU Kab. Rembang	- Proses mempersiapkan ruang untuk pembangunan 20 tahun kedepan dengan muatan-muatan strategis dalam RTRW, meliputi Garis Pantai; Batas administrasi; Kawasan Hutan; Kawasan Pertanian; Mitigasi Bencana; serta Kawasan Lindung.	RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2022-2042 dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Rembang sebagai pusat perekonomian	Masyarakat Kabupaten Rembang	Bagi OPD : Penyusunan RTRW yang terintegrasi dengan perizinan sistem OSS untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Bagi Kelompok Sasaran : mewujudkan wilayah Kabupaten Rembang sebagai pusat

No.	Kegiatan lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
				regional Jawa Tengah bagian timur yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing bertumpu pada keterkaitan sektor industri, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, serta memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.		perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rembang.
3.	Program Konservasi SDA	- Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Konservasi SDA, Balai Konservasi SDA Prov. Jateng, DLH Kab. Rembang, DPUTARU	- Menjaga kelestarian sumber daya alam, penanaman bibit pohon di wilayah hulu, melaksanakan sosialisasi dan kerja bakti bersih Sungai.	- Kecamatan Sale, Kecamatan Gunem, Kecamatan Bulu	- Masyarakat Kabupaten Rembang	- Bagi OPD : Mendukung dan menjaga kelestarian sumber daya air dan ketersediaan air, menjaga infrastruktur pengaman sungai terhadap bencana banjir.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

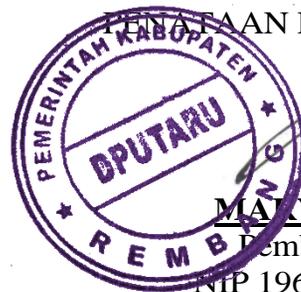
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki enam sasaran strategis dengan dua sasaran strategis tercapai dan empat sasaran strategis tidak tercapai.
- 2) Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
 - Keterbatasan sumber daya alam
 - Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai program/kegiatan yang ada
 - Perubahan kondisi lingkungan alam
 - Keterbatasan kapasitas jalan
 - Belum memadai sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan
- 3) Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemukhtahiran data jalan dan jembatan secara berkesinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan penyelenggaraan jalan secara tepat sasaran dan prioritas.
- Melakukan pemukhtahiran data daerah irigasi secara berkesinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sumber daya air secara tepat sasaran dan prioritas.
- Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses air minum secara berkesinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem penyediaan air minum secara merata.
- Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses sanitasi secara berkesinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik secara merata.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB REMBANG



MARYOSA.,A.TD.,M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

LAMPIRAN

Lampiran 1 IKU

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala DPUTARU Tahun 2024

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DPUTARU Tahun 2024

Lampiran 4 SK Tim Penyusun LKJIP

Lampiran 5 SK SOP Pengumpulan Data Kinerja

Lampiran 6 Profil Indikator Kinerja

Lampiran 7 Prestasi yang diraih



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033
REMBANG 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 900 / 41 / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/ M. PAN / 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core bisnis* perangkat daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
pada tanggal : 19 September 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG



MARYOSA, A.TD., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19671211 199003 1 007

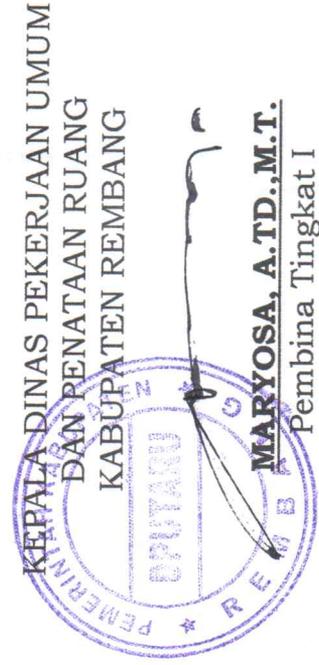
LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rembang
Nomor : 927/A / 2023
Tanggal : 19 - 9 - 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021 - 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi total luas wilayah administrasi	%	Bidang Bina Marga	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum ditambah akses sanitasi dibagi dua x 100 %	%	Bidang Sanitasi dan Air Minum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	% Ketersediaan Air Baku	Jumlah ketersediaan air baku dibagi kebutuhan air baku x 100 %	%	Bidang Sumber Daya Air	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4.	Meningkatnya perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Jumlah pemanfaatan ruang dibagi jumlah luas rencana tata ruang x 100%	%	Bidang Tata Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bsangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	tahun t dikurangi tahun t-1 dibagi tahun t-1 dikali 100%	%	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan, dan pelaksanaan program kegiatan, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB	Nilai/Predikat Hasil Evaluasi	Sekretariat	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NIP. 19671211 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033

REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYOSA, A.TD. ,MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

MARYOSA, A.TD. ,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 196712111990031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan		
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66,88
2.	Sasaran Strategis		
2.1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,50
2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	76,13
2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55
2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8
2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Kontruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Dan Jasa Kontruksi	48,3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 10.785.863.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 6.275.000.000	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3.839.824.000	APBD/APBN
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 3.588.716.000	APBD/APBN
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 300.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 2.127.000.000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 1.700.000.000	APBD
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 30.801.000.000	APBD/APBN
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 13.000.000	APBD
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 60.000.000	APBD

Rembang, 2 Januari 2024

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG**



MARYOSA, A.TD. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 196712111990031007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033

REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYOSA, A.TD. ,MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

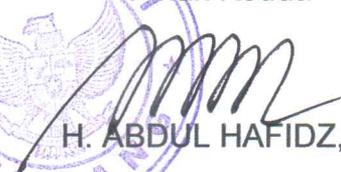
Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024


Pihak Kedua
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I


Pihak Pertama
MARYOSA, A.TD. ,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196712111990031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan		
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66,88
2.	Sasaran Strategis		
2.1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,50
2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	76,13
2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55
2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8
2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Kontruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Dan Jasa Kontruksi	48,3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 11.573.450.561	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 6.792.352.900	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3.839.824.000	APBD/APBN
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 3.588.716.000	APBD/APBN
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 295.582.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 2.516.600.000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 39.347.850	APBD
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 35.075.274.000	APBD/APBN
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 13.000.000	APBD
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 60.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 63.794.147.311	

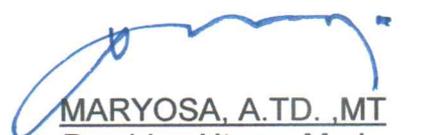
Rembang, 12 November 2024

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG



MARYOSA, A.TD., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196712111990031007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax.(0295) 691033
Rembang - 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 900/11.1/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, perlu dilakukan serangkaian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara tertib baik berkala maupun laporan akhir;
- b. bahwa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja merupakan salah satu komponen yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai SAKIP Tahun Anggaran 2023 disusun di Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan secara terintegrasi meliputi perencanaan, penganggaran, manajemen kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim tersebut diktum KESATU sebagai berikut :

a. Umum :

1. menyusun dan melaksanakan review internal dokumen perencanaan;
2. mendorong dan melaksanakan penerapan anggaran berbasis kinerja, meliputi indikator kinerja utama, berdasarkan dokumen RPJMD, penyusunan Renstra sesuai dengan indikator kinerja utama kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, melaksanakan penyesuaian Renja dengan menyesuaikan IKU kabupaten, melaksanakan Cascadding dan penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja (PK);
3. mendorong dan melaksanakan penyusunan anggaran berbasis *out come*;
4. melaksanakan monitoring evaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK); dan

5. memanfaatkan hasil evaluasi untuk upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

b. Khusus :

1. Penanggungjawab

- a) menyetujui rancangan keputusan tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2023; dan
- b) memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Ketua

- a) mengajukan usulan rancangan keputusan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- b) merumuskan kebijakan teknis rancangan dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c) melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- d) mengajukan rancangan Dokumen Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2023.

3. Wakil Ketua

- a) mengkoordinir penyiapan bahan rumusan rancangan kebijakan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b) mengkoordinir konsultasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- c) mengkoordinir fungsi kesekretariatan.

4. Sekretaris

- a) menyiapkan dan menyediakan kelengkapan dan fungsi kesekretariatan kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

b) menyiapkan fasilitasi dukungan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

5. Anggota

- a) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Kebinamargaan.
- b) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Sumber Daya Air;
- c) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Tata Ruang;
- d) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sanitasi dan Air Minum; dan
- e) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rembang



MARYOSA, ATD., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19671211 199003 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 900 /11.1 /2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
2.	Ketua	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
3.	Wakil Ketua	Kasubbag Program dan Keuangan
4.	Sekretaris	Pelaksana pada Subbag Program dan Keuangan
5.	Anggota	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
6.	Anggota	Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
7.	Anggota	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
8.	Anggota	Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
9.	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
10.	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11.	Anggota	Kepala UPT. Perbengkelan dan Alat Berat

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG



MARYOSA, A.TD., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671211 199003 1 007

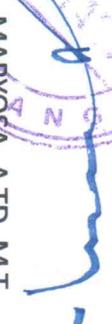
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR SOP	:	900.1 / 09 / 2025
TANGGAL PEMBUATAN	:	3 Januari 2025
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	3 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	:	 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB REMBANG MARRYOSA, A.T.D., M.I. Pembina Utama Muda NIP. 19671211 199003 1 007
NAMA SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA : <ol style="list-style-type: none">1. Memahami kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.3. Mampu melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan capaian kinerja.4. Cakap berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain.5. Mampu mengoperasikan komputer.
		<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

KETERKAITAN :

1. SOP Pembentukan Tim Kerja.
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja.
3. SOP Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.
4. SOP Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Perangkat komputer/lap top, proyektor, printer, dan scanner.
2. Jaringan Internet.
3. Alat Tulis Kantor (ATK).

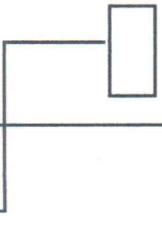
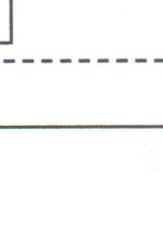
PERINGATAN :

1. Penyampaian Dokumen LKJPD kepada Bupati dan Kementerian PANRB selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari.
2. Melakukan pendataan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jika tidak maka pendataan tidak efektif dan tidak efisien.
3. SOP bisa terlaksana apabila pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan tugas.
4. Penyimpanan arsip Dokumen LKJPD yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai dengan standar.

PENCAITATAN DAN PENDATAAN :

1. Notulen
2. Daftar Hadir Rapat
3. Data kinerja
4. Draf LKJPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKJPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Menelaah Surat Edaran Bupati Hal Penyusunan LKJPD dan memberikan arahan kepada Sekretaris PD untuk menyusun Tim Penyusun LKJPD dan menyiapkan rancangan LKJPD	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2. Menerima disposisi dan arahan dari Kepala PD, menyusun Tim Penyusun LKJPD, dan mengoordinasikan rapat-rapat Tim Penyusun LKJPD.						2 hari	Surat Undangan Rapat	Pembentukan sesuai SOP Pembentukan Tim Kerja.

3	<p>a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKjPD dan pembagian tugas Tim.</p> <p>b. Menghimpun bahan/data yang dibutuhkan, mengolah data dan menganalisis, dan menyusun rancangan akhir LKjPD.</p> <p>c. Menyampaikan draf/rancangan akhir LKjPD kepada Inspektoral Daerah untuk dilakukan reviu.</p>					Bahan Rapat, Daftar Hadir, bahan/data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKjPD	20 hari	Notulen, Daftar Pembagian Tugas, Draft/rancangan akhir LKjPD, Surat Pengantar Permohonan Reviu	
4	<p>Menerima rancangan akhir LKjPD, melakukan reviu dan menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusun LKjPD.</p>					Draf/ rancangan akhir LKjPD dan LHR	10 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	
5	<p>Memperbaiki rancangan akhir LKjPD berdasarkan hasil reviu Inspektoral Daerah (jika ada), mencetak LKjPD hasil perbaikan, meneruskannya ke Sekretaris PD</p>					Draf/rancangan akhir LKjPD dan Laporan Hasil Reviu (LHR)	5 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
6	<p>Memeriksa rancangan akhir LKjPD, memaraf dan meneruskannya ke Kepala PD</p>					Draf/rancangan akhir LKjPD	1 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
7	<p>Memeriksa rancangan akhir LKjPD dan menandatangani (menyetujui).</p>					Draf/rancangan akhir LKjPD	120 menit	Dokumen LKjPD	<p>Jika Kepala PD menyetujui langsung membubuhkan tanda tangan. Jika Kepala PD tidak menyetujui dan memberikan</p>

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU
KABUPATEN REMBANG**

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja³⁾	:	Nilai SAKIP OPD
Definisi Indikator Kinerja	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas serta efektivitas perangkat daerah. Nilai SAKIP OPD mencerminkan tingkat kepatuhan dan implementasi sistem ini dalam manajemen kinerja instansi pemerintah daerah.
Tujuan	:	untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP
Rumus Pengukuran	:	Nilai SAKIP Unit Kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri (bila belum ada penilaian dari Inspektorat)
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2. Perbup. Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup. Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 3. Pemenuhan dokumen perencanaan PD, pencapaian target kinerja, tertib pelaporan kinerja dan evaluasi SAKIP. 4. Komitmen dan Kerjasama tim SAKIP OPD yang baik dalam penyusunan laporan kinerja dan penilaian mandiri SAKIP.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	Sinergi antar bidang dalam mencapai target kinerja daerah masih kurang optimal, tidak adanya mekanisme pemantauan kinerja yang efektif, sehingga sulit mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan tepat waktu, minimnya inovasi dalam pelaksanaan program, SDM yang bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja masih terbatas, program yang mendukung pencapaian kinerja seringkali tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang dan Sekretariat di lingkungan DPUTARU
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) - Renstra (Rencana Strategis) - Renja OPD (Rencana Kerja) - PK OPD (Perjanjian Kinerja) - RKPd (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) - RKA OPD (Rencana Kerja dan Anggaran) - DPA OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) - Laporan Kinerja - Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) - Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Daerah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP.19671211 199003 1 007

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU
KABUPATEN REMBANG**

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja³⁾	: Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat
Definisi Indikator Kinerja	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	: Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Rumus Pengukuran	: $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times 100$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan 3. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik 5. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah responden yang memberikan penilaian tidak memenuhi syarat dan kriteria survei 2. Tidak melaksanakan survei sesuai dengan tujuan yang ditentukan
Unit Kerja Pelaksana	: Sekretariat DPUTARU Kab Rembang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber Data	: Hasil survey kepuasan pelayanan publik



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang

MARYOSA, A.TD., M.T
Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU
KABUPATEN REMBANG**

Kode Outcome¹⁾ :

Pernyataan Outcome²⁾ : Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUTARU

Indikator Kinerja³⁾	: % Keselarasan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Definisi Indikator Kinerja	: Untuk mengukur sejauh mana proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan terealisasi secara efektif.
Tujuan	: 1. Menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan, anggaran, dan capaian kinerja. 2. Menilai efektivitas proses perencanaan dalam mendukung pencapaian target. 3. Memberikan dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengelolaan anggaran.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu}}{\text{Target jumlah dokumen perencanaan yang harusnya tersedia}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: 1. Kebijakan Pemda dalam penyusunan dokumen Perencanaan PD 2. Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dengan Penyelarasan antara RPJMD, Renstra, Renja, dan RKPD. 3. Koordinasi yang baik antar lintas bidang dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: Ketidaksiharian Antara Perencanaan dan Penganggaran, Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Optimal, Kurangnya Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan, Perubahan Kebijakan.
Unit Kerja Pelaksana	: Sekretariat DPUTARU Kab Rembang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber Data	- Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA, DPPA) - Laporan Kinerja (LKPI, LPPD, dan SAKIP)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T
Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU

KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pelaporan keuangan DPUTARU**

Indikator Kinerja³⁾	:	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Tingkat terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan PD
Tujuan	:	Gaji dan tunjangan ASN terpenuhi, penatausahaan keuangan terkelola dengan baik
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana}}{\text{Target jumlah layanan administrasi keuangan}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	1. Koordinasi yang baik antara BPPKAD dengan OPD 2. Dokumen SPJ yang tersedia dan terdokumentasi dengan baik 3. Penggunaan aplikasi keuangan daerah yang baik 4. Anggaran yang mencukupi
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	1. Banyaknya perubahan regulasi membuat SDM belum sepenuhnya memahami aturan terbaru. 2. Minimnya bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan terkait penatausahaan dan pelaporan keuangan. 3. Perbedaan catatan keuangan antara OPD dengan data di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Unit Kerja Pelaksana	:	Sekretariat DPUTARU Kab Rembang
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data	:	- Dokumen DPA OPD terkait belanja pegawai. - Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

**PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU
KABUPATEN REMBANG**

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Terpenuhinya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**

Indikator Kinerja³⁾	: % Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Definisi Indikator Kinerja	: Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Tujuan	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Rumus Pengukuran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah tersedia tepat waktu dibandingkan target Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah harusnya tersedia.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. 2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Penyusunan SOP yang mengatur tata cara perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. 4. Pemanfaatan aplikasi SIMDA BMD untuk pencatatan aset secara elektronik.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran yang tidak mencukupi untuk pemeliharaan aset agar tidak cepat rusak. 2. Minimnya pelatihan bagi pegawai dalam hal manajemen aset, aplikasi pengelolaan BMD, dan perencanaan kebutuhan barang. 3. Pengawasan terhadap kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan aset masih lemah. 4. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya administrasi aset dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Unit Kerja Pelaksana	: Semua Bidang DPUTARU Kab Rembang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber Data	: Dokumen RKPD, Dokumen Usulan Penetapan Status BMD, Dokumen KIB, Dokumen Laporan Mutasi BMD, Dokumen Usulan Penghapusan BMD

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian

Indikator Kinerja³⁾	: Prosentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Definisi Indikator Kinerja	: Tingkat terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian
Tujuan	: Layanan administrasi kepegawaian PD terkelola dengan baik
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terlaksana}}{\text{Target jumlah layanan admistrasi kepegawaian}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk pencatatan dan pengelolaan data ASN secara digital. 2. Pemutakhiran data pegawai secara berkala agar tidak ada dokumen yang tertinggal atau tidak diperbarui. 3. Koordinasi antara BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dengan OPD dalam pengelolaan dokumen kepegawaian.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua ASN memiliki file lengkap, seperti SK pengangkatan, SK kenaikan pangkat, dokumen mutasi, dan lain-lain. 2. Mutasi atau rotasi pegawai sering kali tidak disertai dengan serah terima dokumen yang baik. 3. Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Kepegawaian.
Unit Kerja Pelaksana	: Sekretariat DPUTARU Kab Rembang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber Data	: <ul style="list-style-type: none"> - Database Kepegawaian di OPD - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) - Arsip dan Dokumen Kepegawaian di OPD - Laporan pemutakhiran data ASN - Sistem e-Kinerja ASN

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Terpenuhinya layanan umum kantor

Indikator Kinerja³⁾	: Prosentase Pemenuhan pelayanan umum
Definisi Indikator Kinerja	: Tingkat terpenuhinya pelayanan umum kantor
Tujuan	: Layanan administrasi umum kantor PD terkelola dengan baik
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi umum kantor yang terlaksana}}{\text{Target jumlah layanan admistrasi umum kantor}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan Teknologi yang Mendukung seperti Komputer, printer, jaringan internet, yang tersedia dan berfungsi dengan baik untuk menunjang aktivitas perkantoran. 2. Pegawai yang memiliki kompetensi dalam pelayanan administrasi dan operasional kantor.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran untuk operasional layanan umum kantor tidak memadai. 2. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM dengan pelatihan rutin untuk mengikuti perkembangan teknologi dan prosedur terbaru.
Unit Kerja Pelaksana	: Sekretariat DPUTARU Kab Rembang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber Data	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**

Indikator Kinerja³⁾	:	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Definisi Indikator Kinerja	:	Tingkat terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
Tujuan	:	Layanan administrasi perkantoran yang mendukung operasional perangkat daerah terkelola sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Rumus Pengukuran	:	= $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi umum kantor yang terlaksana}}{\text{Target jumlah layanan administrasi umum kantor}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan Teknologi yang Mendukung seperti Komputer, printer, jaringan internet, yang tersedia dan berfungsi dengan baik untuk menunjang aktivitas perkantoran. 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam administrasi perkantoran. 3. Pembagian Tugas yang Jelas dengan deskripsi tugas dan tanggung jawab.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran dan sarana perkantoran pendukung administrasi. 2. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM dengan pelatihan rutin untuk mengikuti perkembangan teknologi dan prosedur terbaru.
Unit Kerja Pelaksana	:	Sekretariat DPUTARU Kab Rembang
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, RKA, DPA). - Laporan kinerja administrasi perangkat daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja³⁾	: Prosentase BMD Dengan Kondisi Baik
Definisi Indikator Kinerja	: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Tujuan	: Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah dikelola dengan Baik
Rumus Pengukuran	: $= \frac{\text{Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana}}{\text{Target jumlah layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjadwalan perawatan secara rutin untuk kendaraan dinas, peralatan elektronik, bangunan, dan aset lainnya. 2. SDM yang memahami tata cara pencatatan, pengelolaan, dan pemeliharaan barang. 3. Penyediaan anggaran untuk perawatan rutin dan perbaikan aset agar tetap dalam kondisi baik.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukan. 2. Banyak barang cepat rusak karena tidak digunakan dengan baik atau tidak diperhatikan perawatannya. 3. Barang yang rusak tidak segera dihapus dari daftar inventaris, sehingga masih tercatat meskipun tidak bisa digunakan. 4. Ketiadaan ruang penyimpanan yang layak
Unit Kerja Pelaksana	: Sekretariat DPUTARU Kab Rembang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber Data	: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) - Laporan Mutasi BMD - Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMBADA) - Laporan Pemeliharaan dan Perawatan Aset - Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan (RKP) - Laporan Pemeriksaan Fisik Barang Milik Daerah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air**

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase ketersediaan Air Baku
Definisi Indikator Kinerja	: Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut, presentase ketersediaan air baku dihitung berdasarkan kebutuhan air baku yang meliputi kebutuhan air domestik, kebutuhan air industri dan kebutuhan air untuk irigasi tiap tahun dibagi dengan ketersediaan air yang ada tiap tahunnya. Persentase ketersediaan air baku mencerminkan tingkat kualitas pengelolaan sumber daya air dalam manajemen kinerja Bidang Sumber Daya Air.
Tujuan	: Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pengelolaan sumber daya air, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air baku yang semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah ketersediaan air baku}}{\text{Kebutuhan Air Baku}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: 1. RPJMD Kabupaten Rembang 2. Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang 3. Dukungan anggaran dan komitmen bersama terhadap usulan program
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: Kurangnya komitmen dalam pemberian anggaran untuk kegiatan usulan bidang terkait dengan penyediaan air baku, laporan debit air sungai, air embung dan curah hujan dari mantri pengairan belum optimal.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Sumber Daya Air
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: - RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) - Renstra (Rencana Strategis) - Renja OPD (Rencana Kerja) - PK OPD (Perjanjian Kinerja) - RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) - RKA OPD (Rencana Kerja dan Anggaran) - DPA OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) - Laporan Kinerja - Laporan Debit Embung, Curah Hujan dan Debit Sungai



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang

MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik,
Definisi Indikator Kinerja	: Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
Tujuan	: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di Bidang Sumber Daya Air yang layak teknis dan tangguh bencana.
Rumus Pengukuran	: Persentase capaian kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan capaian kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi 2
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: 1. RPJMD Kabupaten Rembang 2. Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang 3. Renja DPUTARU Kabupaten Rembang 4. Dukungan anggaran dan komitmen bersama terhadap usulan program
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: Anggaran untuk kegiatan terkait pengelolaan Sumber Daya Air yang kurang mencukupi.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Sumber Daya Air
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) - Renstra (Rencana Strategis) - Renja OPD (Rencana Kerja) - PK OPD (Perjanjian Kinerja) - RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) - RKA OPD (Rencana Kerja dan Anggaran) - DPA OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) - Laporan Kinerja Kegiatan - Laporan Debit Embung, Curah Hujan dan Debit Sungai



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang

MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Menurunnya kejadian banjir di sungai dan pantai yang rawan setelah pembangunan bronjong, talud sungai, revetment dan normalisasi sungai**

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase bangunan air/Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik
Definisi Indikator Kinerja	: Sebagai salah satu kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam upaya mengatasi resiko bencana akibat daya rusak air. Presentase indikator mencerminkan menurunnya kejadian banjir atau bencana di sungai-sungai dan pantai yang rawan banjir dan abrasi setelah pembangunan tebing, talud, bronjong, revetment dan normalisasi sungai.
Tujuan	: Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pengelolaan sumber daya air, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk memenuhi target indikator kinerja sehingga diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.
Rumus Pengukuran	: Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi infrastruktur Pengendalian Banjir dibagi dengan Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: 1. RPJMD Kabupaten Rembang 2. Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang 3. Renja DPUTARU Kabupaten Rembang 4. Dukungan anggaran dan komitmen bersama terhadap usulan kegiatan
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: Anggaran untuk kegiatan terkait pengelolaan Sumber Daya Air yang kurang mencukupi.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Sumber Daya Air
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: - RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) - Renstra (Rencana Strategis) - Renja OPD (Rencana Kerja) - PK OPD (Perjanjian Kinerja) - RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) - RKA OPD (Rencana Kerja dan Anggaran) - DPA OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) - Laporan Kinerja Kegiatan - Laporan Debit Embung, Curah Hujan dan Debit Sungai

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Pertumbuhan Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki**

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Sebagai salah satu kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam upaya mengelola dan memaksimalkan pendayagunaan air. Presentase indikator mencerminkan kualitas infrastruktur dasar dan pelayanan, pemanfaatan dan kondisi bangunan irigasi dan jaringan irigasi.
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pengelolaan sumber daya air, bertambahnya jumlah bangunan utama dan panjang saluran pembawa/pembuang yang diperbaiki dan upaya apa yang telah dilakukan untuk memenuhi target indikator kinerja sehingga diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.
Rumus Pengukuran	:	Panjang Jaringan irigasi kondisi baik ditambah dengan bangunan irigasi kondisi baik dibagi dengan panjang total jaringan irigasi.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	1. RPJMD Kabupaten Rembang 2. Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang 3. Renja DPUTARU Kabupaten Rembang 4. Dukungan anggaran dan komitmen bersama terhadap usulan kegiatan
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	Anggaran untuk kegiatan terkait pengelolaan Sumber Daya Air yang kurang mencukupi.
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Sumber Daya Air
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	- RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) - Renstra (Rencana Strategis) - Renja OPD (Rencana Kerja) - PK OPD (Perjanjian Kinerja) - RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) - RKA OPD (Rencana Kerja dan Anggaran) - DPA OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) - Laporan Kinerja Kegiatan - Laporan Debit Embung, Curah Hujan dan Debit Sungai

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :

Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya Indeks Aksesibilitas Jalan**

Indikator Kinerja³⁾	:	Indeks aksesibilitas jalan
Definisi Indikator Kinerja	:	Suatu ukuran kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu pusat kegiatan atau simpul kegiatan yang dilayani jalan .
Tujuan	:	Mengetahui tingkat kemudahan akses ke berbagai wilayah
Rumus Pengukuran	:	$\text{Indeks Aksesibilitas Jalan} = \frac{\text{Panjang jalan mantap (km)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$ <p>Jalan Mantap = Kondisi Jalan Baik dan sedang Baik = Tidak ada kerusakan signifikan, nyaman digunakan Sedang = Ada sedikit kerusakan tetapi masih layak digunakan</p>
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas konstruksi dan bahan jalan yang digunakan. 2. Intensitas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan oleh pemerintah daerah. 3. Ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. 4. Kesesuaian perencanaan teknis dengan kondisi lapangan. 5. Kemampuan Direksi Teknis dalam pengendalian kegiatan penyelenggaraan jalan.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban kendaraan yang melintas, termasuk kendaraan berat yang berpotensi merusak jalan 2. Ketidak sesuaian volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan 3. Kondisi cuaca dan faktor geografis, seperti hujan lebat dan tanah longsor yang mempercepat kerusakan jalan. 4. Kurangnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Bina Marga
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber Data	:	- Hasil Kegiatan Survey Kondisi Jalan - Peta jaringan jalan kabupaten

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah melalui jalan yang layak dan terintegrasi dengan jaringan transportasi lainnya.**

Indikator Kinerja³⁾	: Pertumbuhan Jalan dalam kondisi mantap
Definisi Indikator Kinerja	: Untuk mengukur peningkatan panjang jalan yang berada dalam kondisi mantap, yaitu jalan yang memiliki kualitas baik dan sedang sesuai dengan standar teknis jalan
Tujuan	: 1. Menilai pertumbuhan dan peningkatan kualitas jaringan jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat 2. Peningkatan percepatan laju pertumbuhan ekonomi 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Panjang jalan mantap Thn } n - \text{Panjang jalan mantap Thn } n-1}{\text{Total Panjang jalan}} \times 100\%$ Jalan Mantap = Kondisi Jalan Baik dan sedang Baik = Tidak ada kerusakan signifikan, nyaman digunakan Sedang = Ada sedikit kerusakan tetapi masih layak digunakan
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: 1. Kualitas konstruksi dan bahan jalan yang digunakan. 2. Intensitas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan oleh pemerintah daerah. 3. Ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. 4. Kesesuaian perencanaan teknis dengan kondisi lapangan. 5. Kemampuan Direksi Teknis dalam pengendalian kegiatan penyelenggaraan jalan.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: 1. Beban kendaraan yang melintas, termasuk kendaraan berat yang berpotensi merusak jalan 2. Ketidak sesuaian volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan 3. Kondisi cuaca dan faktor geografis, seperti hujan lebat dan tanah longsor yang mempercepat kerusakan jalan. 4. Kurangnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Bina Marga
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	- Data spesifik mengenai kondisi jalan di Kabupaten Rembang - Hasil Kegiatan Survey Kondisi Jalan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T
Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya infrastruktur jalan yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung konektivitas, mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi wilayah.**

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase jalan dalam kondisi mantap
Definisi Indikator Kinerja	: mengukur proporsi panjang jalan yang berada dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibandingkan dengan total panjang jalan yang ada.
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai pertumbuhan dan peningkatan kualitas jaringan jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat 2. Peningkatan percepatan laju pertumbuhan ekonomi 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Panjang jalan mantap (baik dan sedang)}}{\text{Total Panjang jalan}} \times 100\%$ <p>Jalan Mantap = Kondisi Jalan Baik dan sedang Baik = Tidak ada kerusakan signifikan, nyaman digunakan Sedang = Ada sedikit kerusakan tetapi masih layak digunakan</p>
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas konstruksi dan bahan jalan yang digunakan. 2. Intensitas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan oleh pemerintah daerah. 3. Ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. 4. Kesesuaian perencanaan teknis dengan kondisi lapangan. 5. Kemampuan Direksi Teknis dalam pengendalian kegiatan penyelenggaraan jalan.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban kendaraan yang melintas, termasuk kendaraan berat yang berpotensi merusak jalan 2. Ketidak sesuaian volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan 3. Kondisi cuaca dan faktor geografis, seperti hujan lebat dan tanah longsor yang mempercepat kerusakan jalan. 4. Kurangnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Bina Marga
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber Data	: Hasil Kegiatan Survey Kondisi Jalan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) guna mendukung tertib tata ruang, serta optimalisasi fungsi ruang sesuai peruntukannya**

Indikator Kinerja³⁾	:	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR
Definisi Indikator Kinerja	:	Untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Tujuan	:	Memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Luas Kawasan yang sesuai RTR}}{\text{Jumlah Luas Kawasan yang dimanfaatkan}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan RDTR yang detail dan terintegrasi - Kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan tata ruang - Koordinasi yang baik antar instansi terkait (Bappeda, DPUTARU, DPMPTSP, dan Satpol PP) - Pengawasan dan penegakan aturan tata ruang
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - RTR yang sudah ditetapkan tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan wilayah. - Praktik pemanfaatan lahan tanpa izin - Kurangnya penggunaan teknologi seperti sistem informasi geospasial untuk pemantauan pemanfaatan ruang - Masyarakat yang belum memahami pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR.
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Tata Ruang
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none"> - RTRW dan RDTR Kabupaten Rembang - Data Pemanfaatan Lahan dari Bappeda - Perizinan pemanfaatan ruang dari DPMPTSP - Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :

Pernyataan Outcome²⁾ : **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja³⁾	: Penetapan RTR
Definisi Indikator Kinerja	: Untuk mengukur sejauh mana rencana tata ruang (RTR) kabupaten, telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan	: Menetapkan dokumen RTR sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang.
Rumus Pengukuran	: Jumlah Dokumen PERKADA
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan dokumen RTR yang sesuai dengan regulasi. - Legislasi dan persetujuan dalam peraturan daerah terkait RTR. - Sarana pendukung pekerjaan - Tenaga Ahli/Konsultan - Anggaran yang mencukupi
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RTR memerlukan kajian teknis yang kompleks dan memakan waktu lama. - Penetapan RTR memerlukan persetujuan melalui peraturan daerah (Perda), membutuhkan waktu panjang dalam proses legislasi. - Administrasi penetapan Peraturan Daerah harus terkoordinasi dengan Kementerian/ OPD Lain - Data tata ruang yang belum lengkap/kurang akurat menghambat dalam proses penyusunan RTR. - Anggaran tidak mencukupi sesuai dengan tahapan pekerjaan
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Tata Ruang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah (Perda) terkait RTR - Dokumen RTRW dan RDTR - Survey Primer dan sekunder - Data Spasial Badan Informasi Geospasial - Data Statistik (Badan Pusat Statistik) - Dokemen Pelaksanaan Anggaran



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang

MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatkan Kesesuaian Permohonan Pemanfaatan Ruang dengan RTR

Indikator Kinerja³⁾	: Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang
Definisi Indikator Kinerja	: Untuk mengukur sejauh mana permohonan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau instansi pemerintah telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.
Tujuan	: Memastikan bahwa permohonan pemanfaatan ruang sejalan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku serta kemudahan proses perizinan berusaha dan menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Kab. Rembang
Rumus Pengukuran	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepatuhan pemohon terhadap kebijakan tata ruang. - Kecepatan dan transparansi proses perizinan pemanfaatan ruang. - Ketersediaan data geospasial yang akurat untuk mendukung verifikasi kesesuaian permohonan - Ketersediaan anggaran yang mencukupi - SDM yang Profesional
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). - Keterbatasan anggaran - Keterbatasan SDM yang Profesional
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Tata Ruang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang - Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Rembang - Dokumen Pelaksanaan Anggaran



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab Rembang

MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda
 NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja³⁾	: Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang
Definisi Indikator Kinerja	: Untuk mengukur persentase permasalahan penataan ruang yang berhasil diselesaikan dalam periode tertentu dibandingkan dengan total permasalahan yang dilaporkan.
Tujuan	: mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah
Rumus Pengukuran	: Dokumen hasil penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> - Sinergi antara Dinas DPUTARU, ATR/BPN, dan Satpol PP dalam pengawasan dan penegakan hukum - Penggunaan Sistem Informasi Geospasial (GIS) untuk memetakan dan mengidentifikasi permasalahan tata ruang - Ketersediaan anggaran yang mencukupi - Sarana pendukung pelaksanaan kegiatan lapangan
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> - Proses revisi RTRW dan RDTR yang panjang dan birokratis, - Keterbatasan anggaran - Keterbatasan Sarana pendukung pekerjaan/kegiatan lapangan - Keterbatasan personel dalam pelaksanaan pekerjaan
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Tata Ruang
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan T.E.U Indonesia - Survei Lapang - Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang - Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Rembang - Dokumen Pelaksanaan Anggaran



 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab Rembang
MARYOSA, A.TD., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Capaian Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

Indikator Kinerja³⁾	: Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Definisi Indikator Kinerja	: suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyusunan pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan Jasa Konstruksi dapat dicapai. indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menggambarkan proporsi pertumbuhan bantuan teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi yang telah berhasil dicapai.
Tujuan	: untuk mengukur dan mengevaluasi pertumbuhan bantuan teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Presentase pertumbuhan} = \frac{\text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksitahun (n)} - \text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksi tahun (n - 1)}}{\text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksi tahun n - 1}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber Data	: <ol style="list-style-type: none">1. Konstruksi Dalam Angka2. Data Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis kabupaten

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan : **Meningkatnya Pertumbuhan Presentase Ketertiban dalam**
Outcome²⁾ : **Penyelenggaraan Konstruksi**

Indikator Kinerja³⁾	:	Pertumbuhan Presentase Ketertiban dalam Penyelenggaraan Konstruksi
Definisi Indikator Kinerja	:	Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pertumbuhan jasa konstruksi dapat dicapai. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menggambarkan pertumbuhan jasa konstruksi yang telah berhasil dicapai.
Tujuan	:	Untuk mengukur dan mengevaluasi pertumbuhan presentase ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Presentase Pertumbuhan} = \frac{\text{ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi tahun (n)} - \text{ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi tahun (n-1)}}{\text{ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi tahun (n-1)}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi b. Kurangnya sumberdaya manusia c. Tidak memahami pentingnya sosialisasi mengenai Jasa Konstruksi
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data	:	Konstruksi Dalam Angka

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T
Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya Persentase jumlah usaha konstruksi sesuai peraturan dan standar**

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase jumlah usaha konstruksi sesuai peraturan dan standar
Definisi Indikator Kinerja	: Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana Persentase jumlah usaha konstruksi sesuai peraturan dan standar dapat dicapai.
Tujuan	: Untuk mengukur dan mengevaluasi presentase jumlah usaha konstruksi sesuai peraturan dan standar
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah usaha konstruksi sesuai standar}}{\text{Jumah usaha konstruksi}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: a. Keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran stageholder dalam memahami pentingnya penerapan standar dalam penyelenggaraan jasa konstruksi
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber Data	1. Data dan informasi jumlah perusahaan konstruksi, jumlah pekerja, nilai balas jasa, pendapatan, pengeluaran, dan data terkait lainnya, 2. Data usaha jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan : **Meningkatnya kualitas dan kepatuhan pembangunan bangunan gedung terhadap peraturan dan standar teknis yang berlaku melalui pemberian bantuan teknis,**
Outcome²⁾

Indikator Kinerja³⁾	:	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung
Definisi Indikator Kinerja	:	Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai persentase bantuan teknis bangunan gedung.
Tujuan	:	Untuk mengukur dan mengevaluasi persentase bantuan teknis bangunan gedung
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{bantuan teknis bangunan gedung tahun } (n) - \text{bantuan teknis bangunan gedung tahun } (n - 1)}{\text{bantuan teknis bangunan gedung tahun } (n)} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber Data	:	Data bantuan teknis bangunan gedung


 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab Rembang
MARYOSA, A.TD., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya efektivitas dan transparansi dalam proses perizinan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta mewujudkan bangunan yang aman, tertib, dan berkelanjutan**

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase Jumlah Penerbitan IMB/PBG dan SLF Sesuai Pengajuan Pemohon di SIMBG
Definisi Indikator Kinerja	: Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai persentase jumlah penertiban IMB/PBG dan SLF sesuai pengajuan di SIMBG
Tujuan	: Untuk mengukur dan mengevaluasi persentase Jumlah Penerbitan IMB/PBG dan SLF Sesuai Pengajuan Pemohon di SIMBG
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{jumlah bangunan layak fungsi}}{\text{jumlah total pengajuan}} \times 100 \%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber Data	: SIMBG adalah platform resmi yang digunakan untuk pengajuan dan pengelolaan perizinan bangunan gedung, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang

MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Meningkatnya kualitas tata bangunan dan lingkungan melalui optimalisasi bantuan teknis penataan bangunan dan lingkungannya**

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Definisi Indikator Kinerja	:	Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai Persentase jumlah bantuan teknis yang diberikan dalam rangka penataan bangunan dan lingkungan dibandingkan dengan jumlah bantuan teknis yang direncanakan dalam satu tahun.
Tujuan	:	Untuk mengukur dan mengevaluasi persentase Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah Bantuan Teknis Yang Diberikan}}{\text{Jumlah Bantuan Teknis yang Direncanakan}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan Bantuan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan pelaksanaan bantuan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab Rembang



MARYOSA, A.TD., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671211 199003 1 007

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DPUTARU KABUPATEN REMBANG

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Definisi Indikator Kinerja	:	Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai Persentase jumlah bantuan teknis yang diberikan dalam rangka penataan bangunan dan lingkungan dibandingkan dengan jumlah bantuan teknis yang direncanakan dalam satu tahun.
Tujuan	:	Untuk mengukur dan mengevaluasi persentase Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah Bantuan Teknis Yang Diberikan}}{\text{Jumlah Bantuan Teknis yang Direncanakan}} \times 100\%$
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan Bantuan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber Data	:	Laporan pelaksanaan bantuan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungannya



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab Rembang

MARYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

No : 400.14.11 / 0008280

Diberikan Kepada :

Bupati Rembang

atas Pencapaian Kinerja

Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) Daerah Provinsi Tahun 2024

Sebagai:

PERINGKAT 3

Tingkat Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 7 November 2024

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Setra Sekretaris Daerah



SUMARNO SE., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001